



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Provinsi Sumatera Utara

Dalam Lensa

TRIWULAN I
2016

Tim Penyusun



PENANGGUNG JAWAB	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA DRS. JUMSADI DAMANIK, SH, M.HUM
KETUA	: KEPALA BIDANG APLIKASI TELEMATIKA DINAS KOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA DRA. ELI SUHAERiyAH, M.Si
WAKIL KETUA	: KEPALA SEKSI PUSAT INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, SSTP, M.Si
SEKRETARIS	: MULIDA
KONSULTAN	: DRA. YUSNIARTI PILIANG
EDITOR	: DINI SYLVIA MAISTYAROH, SP SOLATIAH NASUTION, SH
OPERATOR	: NURIN, S.KOM NUR KADIJAH, SE
REPORTER	: HUMAS PEMPROVSU SRI WAHYUNI SARAGIH SUDARTO
KAMERAMEN	: DEDE DARMA SIAGIAN, S.KOM M. ICHSAN HIDAYAT, S.KOM SAIDIL BAYAN LUBIS, S.KOM LINTANG PRIADI PURBA, AMD RISKI HANDRIAN
FOTOGRAFER	: CANDRA SEGER, SE KHAIRUL HIFZI, ST MUNAWAR HARAHAAP, SH R. MUHAMMAD IRVAN RIDHO, S.Ti RIZKY HENDARTA TAMIN DAMANIK

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho_Nya, maka buku "Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Dalam Lensa' Edisi Triwulan I Tahun 2016 dapat disusun. Buku ini merupakan dokumentasi foto yang disertai berita kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016.

Penyusunan buku ini merupakan salah satu capaian dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik khususnya Kegiatan Operasional Pusat Informasi Publik dan Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik yang didasarkan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika membuka diri dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media buku ini.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif dalam penyusunan buku ini. Kami berharap semoga kehadiran buku ini dapat membawa manfaat kepada para pembaca sekalian.

Medan, April 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

Januari

- 20160111 Menghadiri Audiensi PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I
- 20160111 Menghadiri HUT Harian Waspada ke-69
- 20160114 Mendampingi Sekda Provsu Menerima Audiensi Panitia Hari Ulang Tahun Kab. Langkat ke-266
- 20160115 Menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H
- 20160118 Menjadi Pembina Upacara Bendera 17-an
- 20160118 Menghadiri Rapat Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID)
- 20160119 Menghadiri Seminar Nasional Perang Melawan Narkoba oleh DPP LIRA
- 20160119 Mengikuti Uji Kompetensi untuk Pejabat Eselon II
- 20160120 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Ombudsman Perwakilan Sumut
- 20160120 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Komisi Informasi (KI) Sumut
- 20160120 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumut
- 20160120 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Dewan Kasenian Daerah Provinsi Sumatera Utara
- 20160121 Menghadiri Kunjungan Kerja TIM USAID
- 20160125 Menghadiri Acara "UZBEKISTAN - The Heart of the Silk Road"
- 20160127 Memimpin Rapat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Diskominfo Provsu Tahun 2016
- 20160127 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Kepengurusan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut
- 20160127 Menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pemulangan Eks Tahanan ke Provinsi Sumut
- 20160127 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Televisi Republik Indonesia (TVRI)
- 20160130 Menghadiri Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Masa Bakti 2015-2020

Februari

- 20160201 Menghadiri Penerimaan Kunjungan Kerja Komite II DPD RI
- 20160204 Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI
- 20160205 Melakukan Panen Raya Cabai Merah Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
- 20160213 Menghadiri Acara Resepsi Pernikahan Anak Kadis Perhubungan Johannes Antonius Sinaga, SH dan Prity Siahaan
- 20160215 Menghadiri Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara
- 20160215 Menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut
- 20160216 Melakukan Panen Bawang Merah Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprovsu
- 20160217 Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Walikota/ Wakil Walikota dan Bupati/ Wakil Bupati Prov. Sumatera Utara
- 20160218 Menerima Kunjungan Kerja TPID Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Banten ke TPID Provinsi Sumatera Utara
- 20160222 Rapat Evaluasi Kinerja Bidang Aplikasi Telematika Dinas Kominfo Provsu
- 20160223 Menyerahkan Hasil Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumut Tahun 2015 kepada Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumut
- 20160226 Melepas Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Diskominfo Provsu
- 20160228 Menghadiri Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Provinsi Sumatera Utara
- 20160229 Menghadiri Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Maret

- 20160304 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Harian Sumut POS
- 20160304 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Harian Sumut 24
- 20160307 Menghadiri Pembukaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
- 20160308 Menghadiri Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tingkat Provsu
- 20160308 Menghadiri Pra Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provsu Zona III
- 20160308 Menerima Kunker Dishub Komunikasi dan Informatika Pemkab Nias Barat dalam rangka Konsultasi Pemutakhiran Website dan Jaringan Internet
- 20160314 Menghadiri Pisah Sambut KAPOLDA Sumut dari Irjen Pol Drs. Ngadino, SH, MM kepada Irjen Pol Drs. Raden Budi Winarso
- 20160315 Menghadiri Pembukaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumut Tahun 2016 Zona IV
- 20160315 Menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara
- 20160317 Menjadi Pembina Upacara 17 an
- 20160318 Operasi Pasar Bersama Bulog Drive Sumut dengan TPID Provinsi Sumatera Utara
- 20160319 Menghadiri Silaturahmi Pengukuhan dan Rapat Kerja Daerah I MUI Sumut
- 20160319 Menghadiri Jamuan Makan Malam Bersama Peserta Rapat Kerja Daerah I MUI Sumut
- 20160320 Menerima Penghargaan Sumut 24 Dahsyat Award
- 20160322 Memimpin Rapat Dewan Juri Lomba Foto Bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Provsu ke-68 Tahun
- 20160323 Ransen Bawang Merah Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah

- 20160324 Menghadiri Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Sumatera Utara
- 20160324 Membuka Sosialisai Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara Online menggunakan Program e-Filing
- 20160324 Menghadiri Pengajian Pemprovsu Membangun Pribadi "PATEN"
- 20160331 Menghadiri Temu Konsultasi BAKOHUMAS dalam rangka Pemilihan Pengurus BAKOHUMAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 - 2018







Jandari



<http://diskominfo.sumutprov.go.id>





KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERIYAH, M.Si
 Menghadiri Audiensi PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I
 Ruang Kerja Sekda Provsu, Senin 11 Januari 2016



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
 Menghadiri HUT Harian Waspada ke-69
 Tiara International Convention Hall Medan, Senin 11 Januari 2016



SEKDAPROVSU TERIMA PANITIA HARI JADI KABUPATEN LANGKAT KE-266

Medan, Sekdaprovsu H. Hasban Ritonga, SH mengatakan Hari Jadi ke-266 Kabupaten Langkat di jadikan sebagai salah satu momen untuk mempromosikan adat budaya lokal Kabupaten Langkat.

Hal tersebut disampaikan Sekdaprovsu H. Hasban Ritonga, SH saat menerima audiensi Panitia Hari Jadi ke 266 Kabupaten Langkat, Kamis (14/01/2016) di ruang kerja Sekdaprovsu Lt. 9 Kantor Gubsu. Pada kesempatan itu Sekdaprovsu didampingi Plh. Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Ferlin Nainggolan, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu Jimmy Pasaribu, Plh Kepala Kesbangpolinmas Provsu Muhammad, Plh Kadis Kominfo Provsu M Ayub.

Sedangkan rombongan yang hadir dipimpin oleh Sekda Kabupaten Langkat dr. H. Indra Salahudin MKes, MM, Asisten 2 Setdakab Langkat H. Hermansyah, Kadis Pariwisata kabupaten Langkat Edy Saputra, Kabag Humas Langkat Rizal Gunawan Gultom, AP, Kasi pariwisata langkat Puan, Kasubbag protokol dan RT Langkat Hilman Anggara Lukha, S.STP, M.AP dan staf protocol langkat Agung Tritantyo, S.STP.

Dikatakan Sekdaprovsu dilihat dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Langkat dalam rangka hari jadi kabupaten Langkat ke-266 acara ini cukup meriah dan pada rangkaian acaranya akan menampilkan adat budaya langkat dari 14 etnis yang ada di Kabupaten Langkat. Hal ini sangat positif dengan kemeriahan rangkaian kegiatan dalam rangka hari jadi ke-266 kabupaten Langkat tersebut tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi. "Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki dari masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Langkat," ujar Sekdaprovsu.

Melihat banyaknya adat budaya yang ada di Kabupaten Langkat, lanjut Sekdaprovsu perlu adanya sosialisasi dan pencerahan khususnya masyarakat Langkat, karena melihat banyaknya adat budaya Langkat yang terdiri dari 14 Etnis yang tersebar di 22 Kecamatan agar tidak disusupi aliran-aliran dan ajaran-ajaran yang melanggar aturan serta norma-norma agama yang dapat memecah belah masyarakat di Kabupaten Langkat.

"Kegiatan ini sangat positif, oleh karenanya perlu adanya pencerahan kepada masyarakat agar suasana kondusif dengan keanekaragaman adat budaya terus dapat dijaga," sebut Sekdaprovsu seraya menambahkan momen Hari Jadi Kabupaten Kota dapat dijadikan momen untuk mempromosikan adat budaya yang ada di Sumatera Utara.

Sementara Panitia yang dipimpin Sekda Kabupaten Langkat dr. Indra Salahudin MKes, MM melaporkan acara Hari Jadi Kabupaten Langkat yang ke 266 juga dirangkaikan dengan kegiatan yang telah direncanakan meliputi lomba karya tulis pers dan umum, turnamen sepak bola U 17 se-Kabupaten Langkat, fun bike, lomba memarnai, lomba busana daerah, fashion Hijab, Pagelaran Budaya Etnis, karnaval kendaraan hias, ranking 1 tingkat SMA dan PNS, hafiah qur'an oleh 1000 santri TPQ se-Kabupaten Langkat, pameran pembangunan di lingkungan SMPD, UKM, BUMN dan BUMD yang ada di kabupaten Langkat, juga menampilkan tari dan lagu 14 etnis secara live pada setiap sore dan malam, lomba padato tingkat TK, SMP dan SMA, dan senam eaerobic bersama SKPD serta perlombaan senam Maumere, yang kesemuanya sudah berlangsung mulai tanggal 16 s/d 22 Januari 2016, serta pemberian tali asih dan penghargaan kepada mantan-mantan Bupati Wakil Bupati Ketua DPRD, Sekda maupun Tim Penyusun Sejarah Langkat, pencipta Lambang, Motto dan Mars daerah.

Sementara untuk masyarakat, Panitia juga mengundang Ustadz Yusuf Mansur dari Jakarta yang akan tampil pada Senin pagi 18 Januari, serta hiburan pada malam harinya. Selain itu lanjut Indra, maksud pihaknya selain melaporkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi ke-266 Kabupaten Langkat, Panitia juga berkeinginan mengundang Bapak Plt. Gubsu Lt. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si untuk dapat menghadiri acara Hari Jadi ke-266 Kabupaten Langkat.

"Diharapkan kehadiran Bapak Plt Gubsu dapat memberi semangat kepada masyarakat kabupaten Langkat sehingga Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-266 yang akan dilaksanakan pada 17 Januari 2016 benar-benar milik masyarakat Langkat sebagaimana keinginan dari Bupati Kabupaten Langkat H. Ngongesa Sitepu, SH," ujar Indra.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Mendampingi Sekda Provsu Menerima Audiensi Panitia Hari Ulang Tahun Kab. Langkat ke-266
Ruang Kerja Sekda Provsu, Kamis 14 Januari 2016

DISKOMINFO PROVSU, PERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW TAHUN 1437 H



Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Diskominfo Provsu) memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H bertempat di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Jumat (15/1). Kegiatan ini diisi tausiyah oleh Ustadz Drs. H. Ardiansyah, LC, MA, dihadiri Kadiskominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum, Kapolresta Medan, dan para Pejabat eselon III dan IV serta Staf di Lingkungan Diskominfo Provsu.

Adapun tujuan acara tersebut yaitu untuk meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladkan teguh sifat siddiq, tabligh, amanah dan fathonah.

Acara tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-ustadz H. Abdul Gamal Nasheer. Dengan mengusung Tema "Dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H Kita Tauladani Akhlakul Karimah Rasulullah".

Kadiskominfo Provsu dalam sambutannya menyampaikan bahwa agama islam itu adalah agama yang paling di akui di dunia kehebatannya karena melihat dari dua perspektifnya. Pertama agama islam itu adalah agama ilahi karena isi dalam Al-Quran itu tidak ada campur tangan manusia namun merupakan wahyu dari Allah yang kebenarannya sepanjang zaman. Yang kedua agama islam adalah agama yang insaniah dimana Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang sifat-sifatnya dapat menjadi teladan bagi umat manusia dimuka bumi.

Sejalan dengan disampaikan oleh kadis kominfo, Al-ustadz H. Ardiansyah, MA juga menyampaikan bahwa dua alasan dalam memeluk islam pertama karena ajaran adalah ajaran tauhid yang artinya satu, tunggal, Esa, dan umatan wahidah merupakan umat yang satu. Dan yang kedua adalah nabi muhammad adalah manusia biasa.

Beliau juga menambahkan "Dalam meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW berangkat dari tauhid. Dimana segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bertauhid kepada allah SWT bahwa allah meliputi setiap apa yang kita lakukan". Pada akhir tausiyahnya Ustadz Drs. H. Ardiansyah, LC, MA menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah contoh bagi umatnya dimana beliau mencontohkan bagaimana memimpin dalam rumah tangganya, memimpin ditengah masyarakat, dan juga menjadi pemimpin agama.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H
 Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Jumat 15 Januari 2016





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Menjadi Pembina Upacara Bendera 17-an
Halaman Kantor Diskominfo Provsu, Senin 18 Januari 2016

TINGKATKAN ETOS KERJA DENGAN BERPEDOMAN PADA UU NO. 25 TAHUN 2009

Medan, Reformasi birokrasi sangat penting dalam melakukan perbaikan secara terus menerus mencakup kepemimpinan dan organisasi, aparat, skill yang dimiliki, proses sarana-prasarana, serta budaya dan etos kerja. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE saat membacakan pidato sambutan Plt Gubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si pada upacara bendera merah putih yang dilaksanakan setiap tanggal 17 di Halaman Kantor Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Senin (18/01).

Lebih lanjut disampaikan tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendorong percepatan reformasi birokrasi adalah dengan mempedomani Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Untuk menjawab tuntutan masyarakat tentang kualitas Pelayanan Publik, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk mempedomani UU No. 25 Tahun 2009. Pada pasal 15 UU No. 25 Tahun 2009 diantaranya menyebutkan kewajiban penyelenggara pelayanan adalah memberikan atau melaksanakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik dan sesuai dengan standar pelayanan. Undang-undang tersebut mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk, serta terwujudnya tanggung jawab Negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Plt. Gubsu berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memahami dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung agar tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, sehingga kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah dapat berjalan seperti yang diharapkan masyarakat.

Upacara tersebut dihadiri para Pejabat Eselon III dan IV dan Staf di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.





INFLASI

INFLASI DESEMBER 2015

No.	Kota	Inflasi Desember 2015	Inflasi Thn Kalender	Inflasi Year on Year
1	Sibolga	2.12	3.34	3.34
2	Pematangsiantar	1.78	3.26	3.26
3	Medan	1.37	3.32	3.32
4	Padangsidempuan	1.43	1.66	1.66
	Sumatera Utara	1.43	3.24	3.24
	NASIONAL	0.96	3.35	3.35



Rapat Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Bank Indonesia (BI) medan, Senin 18 Januari 2016



KABID PUHK DISKOMINFO PROVSU Hj. ROSMIDAR, S.Ag, M.Pd
Menghadiri Seminar Nasional Perang Melawan Narkoba oleh DPP LIRA
Hotel Garuda Plaza Medan, Selasa 19 Januari 2016

PLT GUBSU: NARKOBA AKAR PERSOALAN MASYARAKAT

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengatakan Sumatera Utara sudah masuk darurat narkoba karena narkoba saat ini menjadi akar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Karena itu dia mengajak segenap pihak untuk bersinergi memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal itu dikatakan Plt Gubsu saat membuka Seminar Nasional Perang Melawan Narkoba Sekaligus Pelantikan DPD Pemuda LIRA Sumut di Garuda Plaza Hotel, Selasa (19/1). Hadir Kepala BNN RI Komjen Pol Budi Waseso, Kepala BNN Provsu Brigjen Pol Andi Loedianto, Anggota DPR RI Ruhut Sitompul, Presiden LIRA Olies Datau, Gubernur LIRA Rizaldi Mavi, Tokoh Masyarakat Sumut Syamsul Arifin, narasumber anggota DPR RI Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Prof. DR. Sahat Siagian serta tokoh masyarakat Ester Junita Ginting.

Berdasarkan laporan akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun 2014, diperkirakan sebanyak 3,6 juta sampai 4,1 juta orang menggunakan narkoba dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 tahun. Jadi, ada sekitar 1 dari 4-48 orang berusia antara 10-59 tahun masih atau pernah menggunakan narkoba pada tahun 2014.

Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan BNN dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna narkoba jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta pada tahun 2015. "Tren penyalahgunaan terus meningkat, narkoba harus jadi perhatian semua dan musuh bersama. Bukan hanya tanggungjawab kepolisian dan BNN saja," kata Plt Gubsu. Semua pihak

Plt Gubsu mengajak segenap pihak bersinergi untuk perang melawan musuh dan akar persoalan masyarakat yaitu narkoba. Karena menurutnya kejahatan dan kekerasan yang menjadi persoalan saat ini seperti pembunuhan, kejahatan anarkis, kecelakaan lalu lintas, dan penyakit masyarakat lainnya akibat dari dampak penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, Budi Waseso mengungkapkan negara kita telah menjadi sasaran peredaran narkoba. "Kehancuran negara sudah diambang pintu. Pilar negara tni polri sudah mulai tersusupi. Itu bukan hanya tanggungjawab BNN dan kepolisian," tegasnya. Budi Waseso mengatakan di Columbia kartel narkoba sudah melawan dengan senjata. "Di kita belum, tapi kekuatan sudah ada. Kita tidak boleh menunggu itu besar," ujarnya.

Di hadapan ratusan hadirin, Budi mengingatkan narkoba dan obat-obatan adalah kejahatan luarbiasa, karena 30-40 orang meninggal karena narkoba setiap hari. Korbannya adalah pemuda produktif, sehingga penanganannya tidak bisa dengan cara yang biasa saja. Pemberantasan harus dengan kekuatan, peran TNI harus dilibatkan dalam pemberantasan.

"Karena kita sedang perang. Presiden sudah nyatakan negara kita darurat narkoba, perang terhadap narkoba secara otomatis TNI bisa masuk terlibat," katanya. Dijelaskannya, BNN pada tahun 2015 mengamankan dan memusnahkan jenis sabu sebanyak 3 ton. Namun jumlah itu hanya 20% dari narkoba asal Taiwan dan Cina yang beredar di tanah air.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Mengikuti Uji Kompetensi untuk Pejabat Eselon II di Pemprovsu
Bina Graha Provsu, Selasa 19 Januari 2016



PEJABAT PEMPROVSU IKUTI UJI KOMPETENSI # Plt Gubsu: Bila Tak Lulus, Pejabat Turun Eselon

Medan, Sebagai tahap awal dari penyelenggaraan seleksi pengangkatan jabatan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menggelar uji kompetensi bagi puluhan pejabat eselon II di jajarannya. Bertempat di Gedung Binagraha, Selasa (19/1), sebanyak 37 pejabat eselon II mengikuti uji kompetensi dan sisanya akan digelar Sabtu mendatang.

Plt Gubsu mengatakan uji kompetensi ini sebagai bagian dari upaya pihaknya menempatkan pejabat yang tepat dalam mewujudkan good governance juga amanat UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di lingkungan Pemprovsu terdapat 58 jabatan eselon II yang terdiri dari Jabatan Assisten (4), Staf Ahli (5), Sekretariat daerah dan sekretariat dewan (12), lembaga teknis dan lembaga lainnya (23) dan Dinas (20).

"Ini upaya mewujudkan The right man on the right place atau the right job. Maka ini akan dimulai dengan beberapa tahapan. Yang pertama, khusus bagi pejabat incumbent dilakukan uji kompetensi," papar Plt Gubsu.

Plt Gubsu menekankan bahwa dalam ASN tidak dikenal istilah non job, tapi ada istilah degradasi. Bisa saja eselon II diturunkan menjadi eselon III. "Kalau tidak terima bukan salah kita. Kalau dianggap tidak pas dengan posisinya, maka akan ditawarkan pada posisi setingkat di bawah itu," tegas Plt Gubsu.

Dijelaskannya, dalam proses uji kompetensi akan dilihat juga hasil evaluasi selama 2 tahun terakhir dari track record pejabat yang bersangkutan. "Apakah dari fakta integritas, capaian kinerja, disiplin dan masalah lain misalnya persoalan hukum," ujarnya.

Setelah proses uji kompetensi bagi para pejabat yang menjabat saat ini selesai, baru bisa diketahui berapa posisi jabatan yang akan dilelang. Dari 58 jabatan eselon, menurut Plt Gubsu ada 8 jabatan yang sudah pasti akan dibuka proses seleksinya karena kekosongan jabatan. Dalam seleksi jabatan nantinya akan dilaksanakan tahapan diantaranya pendaftaran, seleksi administrasi, tes, wawancara, dan laporan dan assessment kementerian.

Pihaknya membuka peluang bagi ASN yang memenuhi syarat baik di lingkungan Pemprovsu maupun di luar Pemprovsu. Bagi pejabat di luar Pemprovsu, kata Plt Gubsu, syaratnya harus terlebih dahulu pindah tugas ke Pemprovsu. "Seleksi ini bukan coba-coba, kalau ingin darmabaktikan kerja kepada Pemprovsu, ya harus pindah dari daerah asalnya, dan menerima konsekuensi non job bila gagal," katanya. Plt mengungkapkan harapan melalui seleksi maka orang-orang yang ditempatkan sebagai pejabat adalah yang mumpuni, baik dari sisi pengalaman, pendidikan dan kemampuan lainnya.

Sementara itu, anggota Panitia Seleksi Jabatan Prof. DR. Hj. Irmawati, Psi yang dalam kesempatan ini menjabat ketua tim uji psikologi mengatakan pihaknya menguji berbagai kompetensi diantaranya menangani masalah, mencari solusi, mengembangkan hal baru, keterbukaan untuk hal baru, kompetensi kerjasama dan kepemimpinan. "Secara keilmuannya ada standar penilaian, dimana tahapannya ada tes tertulis, kerja kelompok, diskusi kelompok, dan wawancara, yang semuanya kami olah untuk mendapatkan kesimpulan terhadap kompetensi seseorang," beber Irma.

PLT GUBSU TERIMA HASIL PENELITIAN PELAYANAN PUBLIK OMBUDSMAN RI # Plt Gubsu Minta SKPD Tingkatkan Kualitas Layanan

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si meminta seluruh SKPD meningkatkan mutu pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal itu disampaikan Plt Gubsu menyikapi hasil penelitian Ombudsman RI terhadap tingkat kepatuhan terhadap 13 pelayanan publik dengan nilai Sedang.

Dalam pertemuan antara Plt Gubsu dengan Perwakilan Ombudsman RI di Kantor Gubsu, Kepala Perwakilan ORI Provsu Abyadi Siregar menyerahkan hasil penelitian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dari 13 pelayanan publik pada 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah Sumatera Utara, hasilnya 8 pelayanan termasuk zona hijau (tinggi), 3 pelayanan termasuk zona kuning (sedang) dan 2 pelayanan termasuk zona merah (rendah). Rata-rata nilai rata-rata dari seluruh pelayanan yang diselenggarakan Pemprovsu tersebut rata-rata bernilai 75,54 atau masuk zona kuning (tingkat kepatuhan sedang).

Plt Gubsu mengucapkan terimakasih karena Ombudsman RI telah melakukan penelitian di lingkungan Pemprovsu maupun lima kabupaten lainnya di Sumut yaitu Deliserdang, Medan, Langkat, Dari dan Serdang Bedagai. Plt Gubsu berharap hasil penelitian bisa menjadi acuan para SKPD di jajarannya maupun Kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.

"Terimakasih sudah melakukan penelitian. Masih ada SKPD yang memberikan layanan dengan kualitas yang masih rendah menjadi masukan bagi kami, ke depan SKPD harus melakukan perbaikan kualitas yang ada. Saya minta penelitian ini ditindaklanjuti," harap Erry Nuradi. Dia mengatakan peningkatan pelayanan bagi masyarakat merupakan komitmen pihaknya. Dimana tahun 2016 Pemprovsu akan menyediakan layanan call center untuk memberikan layanan lebih baik lagi kepada masyarakat dengan program Smart Province. Ia juga berharap agar ke depannya Ombudsman RI bisa melakukan penelitian terhadap seluruh SKPD yang ada.

Kepala Perwakilan ORI Provsu Abyadi Siregar dalam kesempatan itu didampingi para asisten yaitu Ricky Nelson Hutahaean, Tetty Nurliani Silaen, Edward Silaban, Hana Ginting. Abyadi menjelaskan, penelitian dilakukan berkelanjutan sejak tahun 2013 terhadap produk pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah se Indonesia. Pada tahun 2015 penelitian diselenggarakan pada bulan Maret-Mei 2015. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 13 produk layanan administrasi termasuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen pimpinan. Ujara Abyadi.

Abyadi Siregar mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian, Ombudsman menyarankan Pemprov SUMUT dapat menyelenggarakan program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Selain dipantau, Ombudsman RI bersedia membantu atau memfasilitasinya," katanya.

SKPD yang dinilai adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya meraih nilai 87,00), Dinas Binamarga (Pemeliharaan Tanah pada Ruang Milik Jalan nilai 93,00), Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara (Surat Izin Penangkapan Ikan nilai 55,00, Surat Izin Usaha Perikanan nilai 55,00, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) nilai 55,00).

Selanjutnya Dinas Kesejahteraan dan Sosial (Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Langsung/tidak langsung nilai 48, Dinas Koperasi UKM (Pelayanan Pengesahan Badan Hukum/ Akta Pendirian Koperasi nilai 96,00), Dinas Pendapatan Daerah (Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK nilai 95,00), Dinas Perhubungan (Penerbitan Izin Trayek Angkutan nilai 93,00).

Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Rekomendasi Revitalisasi Pasar Tradisional nilai 17,00), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Rekomendasi Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran Bibit Ternak kedalam dan keluar Provsu nilai 96,00; Surat Keterangan Kesehatan Hewan nilai 96,00) dan UPT Samsat Sidikalang (Surat Tanda Nomor Kendaraan nilai 96,00). Kategorisasi penilaian adalah nilai 0-50 tingkat kepatuhan rendah (zona merah, 51-80 tingkat kepatuhan sedang (zona kuning) dan nilai 81-100 tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau).



KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Ombudsman Perwakilan Sumut
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Rabu 20 Januari 2016

PLT GUBSU : KIP MITRA STRATEGIS PEMPROVSU DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KIP Sumut) menjadi mitra strategis dalam peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Harapan itu disampaikan Plt Gubsu ketika menerima lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara H. M. Zaki Abdullah (Ketua), Drs. Mayjen Simanungkalit, H. M. Syahyan RW, Drs. Robinson Simbolon, Ramdeswati Pohan M.SP. dan Sekretaris KIP Sumut, Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si dan Zulfan Sulaiman Siregar SPI di ruang kerjanya Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jln Diponegoro Medan, Rabu (20/1/16).

Mantan Bupati Serdang Bedagai ini menyambut baik kunjungan Komisioner KIP Sumut. Menurutny, banyak hal dan informasi didapatkan terkait perkembangan keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara. Karenanya, Dia kembali berharap, agar Komisioner KIP Sumut terus meningkatkan kinerjanya dalam upaya penyadaran terhadap keterbukaan informasi, khususnya ke pejabat publik di Pemprovsu.

"Saya minta dijadwalkan pertemuan dengan para pimpinan SKPD, sekaligus dengan Ombudsman. Biar mereka (pimpinan SKPD) mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya dalam pemberian informasi publik," ujar Plt Gubsu.

Menurut Plt Gubsu, para pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di jajaran Pemprovsu memang harus terus diingatkan akan kewajiban-kewajiban terkait pelayanan informasi publik. Sebab pemerintah atas persetujuan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sementara itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

"Mungkin banyak aturan-aturan yang belum dipatuhi pejabat kita. Karena itu, Saya berharap, KIP terus melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik di Sumut," papar Erry.

Dikatakan Plt Gubsu, pada prinsipnya pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan mematuhi apa yang diamanahkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karenanya, Dia akan menegur dan melayangkan surat ke Bupati Walikota di Sumatera Utara yang belum menjalankan amanah UU KIP, seperti adanya kabupaten/kota di Sumut yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Saya akan segera surati daerah-daerah yang belum membentuk PPID. Karena ini perintah Undang-Undang," tegas Plt Gubsu.

Pada kesempatan itu, Plt Gubsu juga mengungkapkan, bahwa APBD Sumut tahun 2015 sudah on the track (berada pada jalurnya). APBD Sumut tidak lagi defisit, malah silva Rp500 miliar. Kondisi itu mengalami perbaikan dibanding sebelumnya yang mengalami defisit 10 hingga 17 persen. Plt Gubsu juga berharap dengan transparansi dan keterbukaan, kinerja dan pengelolaan APBD Sumut bisa lebih baik lagi.

"Kita berharap, ke depannya bisa lebih baik lagi," harap Plt Gubsu lagi. Sementara itu, Ketua KIP Sumut H.M Zaki Abdullah menjelaskan, bahwa tujuan dirinya bersama empat komisioner KIP Sumut bertemu dalam rangka silaturahmi dan melaporkan hasil kinerja KIP selama setahun. Kata Zaki, sesuai pasal 28 ayat (2) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.

"Hasil kinerja kami selama satu tahun, wajib kami laporkan ke Gubernur dan DPRD. Ini merupakan perintah Undang –Undang KIP," ujar Zaki.

Disebutkan Zaki, sejak dilantik, 10 September 2012 hingga Desember 2015, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah menangani 554 kasus sengketa informasi publik. Kasus sengketa informasi terbanyak di 2015 sebanyak 284 kasus, 2014 sebanyak 106 kasus dan tahun 2013 sebanyak 164 kasus.

"Pejabat yang disengketakan, termasuk pejabat di Pemprovsu," beber Zaki. Karenanya, Zaki berharap kepada Plt Gubsu agar mendorong pejabat di Pemprovsu memahami UU KIP dan meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik di jajaran Pemprovsu. Apalagi kata, Zaki Abdullah peningkatan pelayanan akan keterbukaan informasi di badan publik termasuk dalam salah satu nawa cita Presiden Joko Widodo.

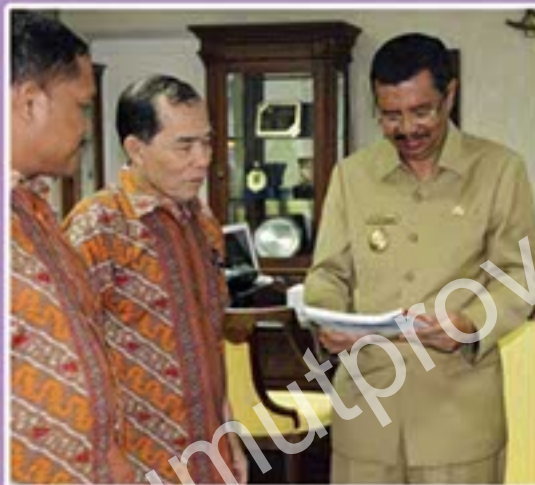
"Pada acara pemberian penghargaan keterbukaan informasi di Istana Negara, Desember 2015 lalu, Presiden Jokowi mengingatkan agar pejabat publik terbuka," papar Zaki.

Disebutkan Zaki lagi, dari 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi Sumut tidak termasuk dalam 10 besar keterbukaan informasi. Dari Sumut yang mendapat penghargaan hanya Universitas Sumatera Utara (USU) yang mendapat rangking 6 keterbukaan informasi kategori perguruan tinggi.

"Kami berharap ke depan, Pemprovsu mendapat penghargaan. Tentu untuk bisa meraihnya, pejabat di Pemprovsu harus lebih terbuka. Karena jika terbuka, Insya Allah pejabat di jajaran Pemprovsu terhindar dari praktek korupsi," harap Zaki.



KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Komisi Informasi (KI) Sumut
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Rabu 20 Januari 2016





KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si
 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumut
 Ruang Kerja Plt. Gubsu, Rabu 20 Januari 2016

PLT GUBSU HT ERRY NURADI: PDGI HARUS SIAP BERSAING DI ERA MEA

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) harus siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurut Plt Gubsu sejak 1 Januari 2016 tidak ada lagi batasan-batasan untuk masyarakat ASEAN. Dicontohkannya masyarakat Sumatera Utara tidak boleh melarang jika ada dokter-dokter gigi atau dokter umum yang buka praktek di Medan Sumatera Utara.

Karena pada kesepakatan MEA khususnya bidang kesehatan ada 3 item yaitu dokter umum, dokter gigi dan perawat. "Oleh karenanya dokter umum, dokter gigi dan perawat khususnya yang ada di Sumatera Utara harus mempersiapkan diri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Plt Gubsu yang didampingi Kadis Kesehatan Provsu dr RR Siti Hatati Surjantin, M.Kes, dan Pejabat Eselon III Dinas Kominfo Provsu.

Dokter gigi lanjutnya harus meningkatkan kualitas baik dari sisi SDM, infrastruktur, dan pelayanan yang berkualitas agar mampu bersaing dengan negara-negara lain khususnya di era MEA. "Karena siap tidak siap, kita harus siap bersaing," tegas Plt Gubsu.

Harapan itu disampaikan Plt Gubsu saat menerima audiensi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Medan. Plt Gubsu ketika menerima pengurus PDGI cabang Medan yang dipimpin Ketua drg M. Ukur S, Wakil Ketua drg Indra S, Sekretaris drg Widi Prasetyo serta pengurus lainnya beserta Panitia HUT PDGI ke-66 di ruang kerjanya Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jln Diponegoro Medan, Rabu (20/1/16).

Pada kesempatan itu Plt Gubsu juga mengharapkan untuk bidang kedokteran gigi harus mempunyai standarisasi Internasional yang diakui dunia. Misalnya standarisasi ruang praktek, harus ada kriteria. Sehingga masyarakat yang ingin berobat lebih tertarik dengan tampilan dan pelayanan yang maksimal. "Kesemuanya ini merupakan salah satu upaya untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain," ujar Plt Gubsu.

Plt Gubsu juga menghimbau kepada PDGI untuk mendata seluruh anggotanya. Menurut Plt Gubsu data dari seluruh anggota asosiasi sangat diperlukan dengan data tersebut dapat menjadi wadah untuk berkumpulnya para dokter gigi untuk mendapatkan masukan-masukan demi kemajuan organisasi Persatuan Kedokteran Gigi Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Plt Gubsu juga berharap acara HUT ke-66 PDGI yang akan dilaksanakan pada 30 Januari 2016 berjalan dengan sukses. "Dengan HUT ke-66, semoga PDGI menjadi organisasi profesi yang solid, membina anggotanya dan berperan aktif untuk memajukan pembangunan di bidang kesehatan di Sumatera Utara," sebut Plt Gubsu.

Sementara Ketua Panitia mengatakan bahwa PDIG Cabang Medan akan mengadakan HUT ke-66 pada tanggal 30 Januari 2016 di Hotel Tiara. Selain itu, lanjut M. Ukur bahwa PDIG juga akan melaksanakan even yang bertaraf nasional bahkan internasional yang akan direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017 dan Medan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Pada even ini akan dihadirkan pembicara-pembicara baik dari lokal dan internasional.

Pada kesempatan tersebut, drg M. Ukur juga mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program-program kegiatan yang ada pada profesi kedokteran gigi mensukseskan dan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Utara. "Semoga PDIG senantiasa bisa menjaga profesionalisme profesi dokter gigi dan kegiatan HUT yang ke-66 akan sukses terlaksana," ujar drg M. Ukur seraya menambahkan bahwa PDIG akan selalu berupaya untuk dapat bersaing di era MEA.





KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Dewan Kasenian Daerah Provinsi Sumatera Utara
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Rabu 20 Januari 2016



KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si

Meghadiri Kunjungan Kerja TIM USAID

Ruang Melati Kantor Gubsu, Kamis 21 Januari 2016



PLT GUBSU HARAPKAN KERJASAMA PARIWISATA UZBEKISTAN-SUMATERA UTARA LEBIH DITINGKATKAN

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Uzbekistan semakin ditingkatkan, khususnya di bidang pariwisata. Uzbekistan adalah salah satu negara Islam di Timur Tengah yang sangat dikenal yang mempunyai kesamaan dimana Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Islam. Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu saat menghadiri pertemuan dengan Dubes Uzbekistan dan para pengusaha dan agency travel dari Uzbekistan, Senin (25/01/2016) di Hotel JW Marriot.

Hadir pada kesempatan itu Asisten Kesos Zulkarnain, Plh Asisten Ekbang SetdaprovSU Ibnu S Hutomo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Elisa Marbun, Kepala Biro Otonomi dan Kerjasama SetdaprovSU Jimmy Pasaribu, Kadis Pariwisata dari Medan, dari Asita dan Sukma, Ketua Asita Provsu Solahuddin Nasution dan para pengusaha travel dari Medan dan dari Uzbekistan.

Salah satu peninggalan sejarah yaitu makam yang cukup dikenal di Uzbekistan adalah makam Imam Buchori yang merupakan salah satu tokoh Islam yang cukup dikenal di Uzbekistan. Selain tokoh Islam Ibnu Sina atau Avicenna merupakan seorang dokter, Imman, filsuf sekaligus pahlawan. Ibnu Sina lahir pada abad ke-10 di sebuah wilayah di Persia bernama Afsyana, Bukhara yang kini masuk wilayah negara Uzbekistan dan meninggal pada usia 57 tahun. Yang merupakan tokoh pertama dan banyak tokoh-tokoh Islam. Sehingga peluang kerjasama khususnya bidang pariwisata sangat besar peluangnya sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia khususnya untuk masyarakat di Sumatera Utara. "Karena ada pepatah yang mengatakan Tak Kenal maka Tak Sayang," sebut Plt Gubsu.

Baru-baru ini lanjut Plt Gubsu, Arab Saudi telah membuka penerbangan langsung dari Jeddah dan Madina - Medan. Setelah usai kunjungan rohani (Umroh) dari Arab Saudi, masyarakat Sumatera Utara banyak mengunjungi negara lain seperti Eropa, Turki, Dubai dan lainnya dan kemungkinan besar para wisatawan rohani akan mengunjungi Uzbekistan.

Pada kesempatan itu Plt Gubsu mengatakan bahwa pertemuan yang dilaksanakan Dubes Uzbekistan dengan para delegasi khususnya bidang pariwisata dan travel sangat baik dan mengimbau para pengusaha khususnya pengusaha travel di Sumatera Utara untuk mengambil peluang kerjasama dengan delegasi travel dari Uzbekistan. "Karena ada destinasi yang sangat menarik di Uzbekistan. "Diharapkan dengan pertemuan hari ini ada MoU antara pengusaha travel Uzbekistan dengan pengusaha travel dari Sumatera Utara," sebut Plt Gubsu seraya menambahkan pemerintah akan mendorong agar kerjasama antara Sumatera Utara dengan pemerintah

Selain itu Plt Gubsu juga mengatakan bahwa Indonesia telah membuka bebas visa tujuan wisata lebih 90 negara. Jumlah yang luar biasa dari sebelumnya hanya 15 negara yang ini menjadi 90 negara. "Diharapkan Uzbekistan juga dapat membuka bebas visa untuk Indonesia paling tidak untuk kunjungan wisata yang singkat pendek kurang lebih dua minggu," ujar Plt Gubsu. Selain bidang pariwisata Plt Gubsu juga mengajak kerjasama dibidang lainnya dengan pemerintah Uzbekistan dan kerjasama tersebut juga akan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sehingga kerjasama yang telah terjalin akan semakin baik lagi.

Sementara Dubes Uzbekistan untuk Indonesia Shavkat Jamalov bahwa pertemuan yang dilaksanakan hari ini adalah untuk memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Uzbekistan yang menurutnya punya banyak potensi menarik khususnya dibidang tujuan wisata. Kunjungan ini, lanjutnya merupakan kunjungan kedua yang sebelumnya Dubes Uzbekistan telah mengunjungi Sumatera Utara pada Agustus 2015 yaitu ke Daerah Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dikatakannya bahwa Presiden RI Soekarno juga telah berkunjung ke Uzbekistan dan dalam kunjungannya di telah berkunjung ke Makam Imam Bukhari yang merupakan salah satu tokoh Islam dari Uzbekistan. Oleh karenanya Pemerintah Uzbekistan ingin lebih meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya dengan masyarakat Sumatera Utara karena antara kedua negara memiliki kesamaan khususnya pada tujuan wisata rohani. "Pemerintah Uzbekistan mengharapkan kerjasama antara Pemerintah Uzbekistan dan Indonesia khususnya Sumatera Utara khusus dibidang pariwisata akan lebih ditingkatkan lagi," sebut Shavkat.



KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
 Menghadiri Acara "UZBEKISTAN-The Heart of the Silk Road"
 Hotel J.W. Marriot Medan, Senin 25 Januari 2016

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILIHAT PERILAKU KERJA PRODUKTIF



Medan, Pih. Kepala Dinas Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE memimpin rapat Penyelesaian pembuatan SOP (Sasaran Operasional Prosedur), Laporan Hasil Kekayaan ASN (LHKASN), Pembuatan Daftar Nilai PNS/DP3 (Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016 dan Disiplin PNS dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu Rabu (27/01).

Hadir dalam rapat ini, Kepala Bidang Postel Gelora Viva Simulungan, SE, MM, Kepala Bidang SKDI Afini, SE, seluruh pejabat struktural dan fungsional serta staf dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu.

Berdasarkan data yang diperoleh saat ini, untuk kelengkapan pengumpulan Laporan Hasil Kekayaan ASN (LHKASN) 2016 Diskominfo Provsu belum terhimpun lengkap, diperkirakan baru ada 28 orang PNS yang sudah menyerahkan berkas. Perlu adanya penertiban disiplin absensi secara elektronik dalam menunjang sasaran kinerja PNS.

Lanjutan lainnya dalam mendukung struktur Pemerintahan agar berjalan dengan baik, tiap PNS harus melakukan prosedur sasaran pekerjaan secara terstruktur dan terdata dalam pencapaian sasaran kinerja. Karena pada dasarnya penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil diukur dalam tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja.

Kabid Postel Diskominfo Provsu mengatakan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif dan terstruktur dalam pencapaian hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil.

Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi memang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Sebagai contoh dikatakannya, Provinsi DKI pada saat ini telah menjalankan program sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan pada pengerjaan kinerja secara online. Yang seluruh pengerjaan tiap PNS baik staf maupun pejabatnya terhubung secara online.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
 Memimpin Rapat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Diskominfo Provsu Tahun 2016
 Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Rabu 27 Januari 2016



PLT GUBSU TERIMA PENGURUS SPS SUMUT PERIODE 2016-2020

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap kepada Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut menjadi mitra strategis turut membantu mensosialisasikan tugas pemerintah khususnya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, baik tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. "Juga memberi masukan berupa saran dan kritik dan hal-hal yang mungkin belum memuaskan masyarakat," sebut Plt Gubsu.

Harapan itu disampaikan Plt Gubsu ketika menerima Pengurus SPS Sumatera Utara periode 2016-2020, Rabu (27/01/2016) di ruang kerja Plt Gubsu Lt.9 Kantor Gubsu. Pengurus yang hadir dipimpin Ketua H. Fa-rianda Putra Sinik, SE, Penasehat H. M. Zaki Abdullah, Sekretaris Mhd. Syahril, Bendahara H. Baharuddin dan wakil Sekretaris Rianto Aghly, SH (Anto Genk). Sedangkan Plt Gubsu pada kesempatan itu didampingi Staf Ahli Gubsu Robertson, PI Kadis Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE.

Oleh karenanya, lanjut Plt Gubsu pemerintah akan memberikan perhatian dan dukungan kepada mitra-mitra strategis yang membantu pemerintah termasuk SPS. Karena peran strategis dari pers menurut Plt Gubsu bahwa pers merupakan trias politika yang ke empat. Selain sebagai pemberi informasi edukasi dan hiburan kepada masyarakat. Pers juga punya fungsi sebagai sosial kontrol (pengawas) sehingga masyarakat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak.

Pada kesempatan itu Plt Gubsu juga mengatakan Pers sebagai perusahaan tentunya harus memiliki badan hukum dan memperhatikan apa-apa yang menjadi hak dari anggotanya serta memberi pemahaman apa yang termaktub dalam undang-undang pers kepada anggotanya. "Kedepannya SPS diharapkan mempunyai kewibawaan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi pers lainnya," ujar Plt Gubsu.

Selain itu Plt Gubsu juga berharap kepada SPS dapat menjadi contoh bagi SPS-SPS yang ada di Indonesia. Karena SPS Sumut mendapat penghargaan cabang SPS terbaik se-Indonesia. Kepada Pengurus yang baru saja terpilih Plt Gubsu mengucapkan selamat dan berharap kepada pengurus yang baru terpilih dan terus bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Pengurus baru diharapkan akan memberikan kemajuan di dunia pers khususnya SPS," tutupnya.

Sementara ketua SPS terpilih Farianda Putra Sinik pada audiensi tersebut melaporkan bahwa kepengurusan SPS Cabang Sumut periode 2016-2020 telah terbentuk dalam Musyawarah Cabang (Muscab) di Hotel Ga-ruda Plaza Medan, Selasa (26/01/2016).

Susunan pengurus SPS Cabang Sumut periode 2016-2020 terdiri atas Penasihat H. Teruna Jasa Said (Waspada), H. M. Zaki Abdullah (Berita Sore), Supandi Kusuma (Analisa), Immanuel Panggabean (SIB), dan T. Hasyim (Metro 24). Ketua H. Fa-rianda Putra Sinik, SE (Medan Pos), Wakil Ketua Andi Laksana Said (Waspada), Sujito Sukirman (Analisa), Dessy Fifi Septiani, SE (Gebrak), dan M. Erwin Siregar (Berita So-re). Sekretaris Mhd.Syahril (Realita), Wakil Sekretaris Rianto Aghly, SH (Sumut 24), Bendahara H. Baharuddin (Andalas) dan Wakil Bendahara Asih Astuti (Sumut Pos).

Dalam kesempatan itu dia juga melaporkan bahwa Pelantikan Pengurus SPS Cabang Sumut Periode Sumut akan diadakan di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 8 Februari 2016 yang akan dilakukan oleh Ketua SPS Pusat Bapak Dahlan Iskan. Kesembilan orang pengurus yang telah terpilih akan ikut pada acara pelantikan tersebut. "SPS berharap pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat terus bekerjasama dengan SPS Sumut guna keterbukaan informasi di Sumut dan SPS Sumut siap mendukung program-program pemprovsu guna kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut," ujarnya.

Penasehat H. M. Zaki Abdullah pada kesempatan itu juga mengajak kepada semua pihak termasuk pemprovsu untuk sama-sama menjaga tidak timbul penerbitan-penerbitan gelap yang akhir-akhir ini sering dijumpai di masyarakat. Sehingga wibawa insan pers itu tidak ada dan meresahkan masyarakat. "SPS berharap semua pihak bisa sama-sama menjaga penerbitan gelap yang sering terjadi," sebutnya.



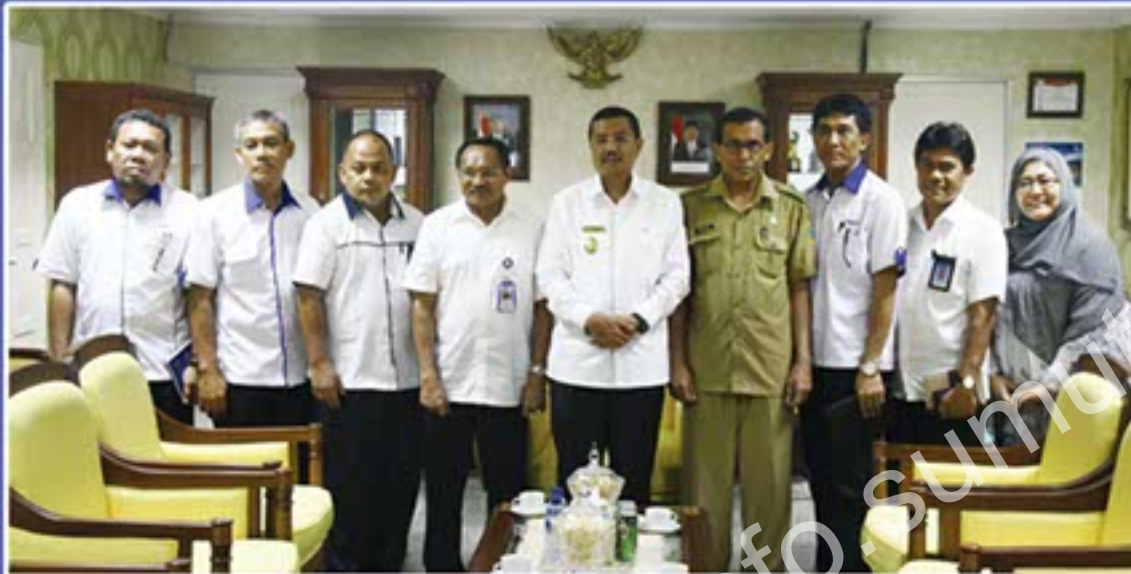
SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU, H. M. AYUB, SE
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Kepengurusan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Rabu 27 Januari 2016





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pemulangan Eks Gafatar ke Provinsi Sumut
Ruang Rapat Beringin Kantor Gubsu, Rabu 27 Januari 2016

SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Televisi Republik Indonesia (TVRI)
Ruang Kerja Wagubsu, Rabu 27 Januari 2016





MARGIONO LANTIK PENGURUS PWI SUMUT PLT GUBSU: PEMPROVSU SIAP MENDUKUNG

Medan, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat H. Margiono melantik Pengurus PWI Sumut masa bakti 2015-2020 dalam suatu prosesi upacara di Hotel Garuda Plaza Medan, Sabtu (30/1/2016) malam. Hadir saat itu, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si bersama unsure Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provsu, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan lembaga, sejumlah pimpinan media massa, tokoh masyarakat dan ulama, serta ratusan undangan lainnya.

Prosesi pelantikan ditandai pembacaan surat keputusan oleh Ketua Bidang Daerah PWI Pusat Atal S Depari, penyerahan pataka dari Ketua Umum PWI Pusat H. Margiono kepada Ketua PWI Sumut masa bakti 2015-2020 H. Hermansjah, SE didampingi 54 unsur pengurus yang dilantik, serta penandatanganan berita acara. Dalam sambutannya, Plt Gubsu menyampaikan apresiasi atas pelantikan yang mengusung tema 'Menuju Wartawan Profesional Berkompoten' karena media memiliki peran strategis dalam menyukseskan pembangunan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. "Karena itu, Pemprovsu akan selalu siap memberi dukungan untuk merealisasikan program kerja PWI Sumut," kata Erry.

Menurut Plt Gubsu, media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berdemokrasi dan media mewakili suara rakyat, serta memainkan fungsi strategisnya sebagai salah satu pusat informasi, sarana hiburan dan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketua Umum PWI Pusat H. Margiono dalam pidato pelantikannya menyampaikan apresiasi dengan pengurus PWI Sumut yang menjalankan program organisasi dengan sangat baik. Bahkan di pusat sendiri, aku Margiono, orang Sumut yang memberikan warna terbaik dalam menjalankan program organisasi. "Orang Medan punya peran penting dalam memajukan pers nasional" ucapnya.

Sementara Ketua PWI Sumut H. Hermansjah dalam sambutannya menyampaikan, kepengurusan pada periode 2015-2020 dipilih secara aklamasi. Diharapkan menjadi tekad kuat seluruh pengurus wartawan dan stakeholder untuk kemajuan pers di Sumut khususnya dan skala nasional umumnya.

Hermansjah juga menyampaikan tekadnya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) wartawan sehingga output yang dihasilkan menunjukkan profesionalitas dan dedikasi kerja yang baik. Untuk itu, lanjutnya PWI Sumut akan menjalin kerjasama dengan universitas dan perguruan tinggi dalam melaksanakan pelatihan keahlian, penguasaan teknologi informasi dan keterampilan lainnya.

Dalam melaksanakan prioritas penguatan SDM wartawan itu, jelasnya PWI Sumut juga akan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara periodik, karena masih separuh dari wartawan di Sumut belum ikut UKW yang menjadi tuntutan Dewan Pers. "PWI juga akan memprioritaskan program peningkatan kesejahteraan wartawan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Peningkatan kualitas, kapabilitas dan kredibilitas SDM wartawan ini sangat penting karena kita akan masuk dalam era persaingan global yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," katanya.

Komposisi kepengurusan PWI Sumut yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) PWI Pusat nomor 200-PGS/PP-PWI/2015 yakni Ketua H. Hermansjah, SE (Analisa), Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs. Khairul Muslim (Medan Pos), Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Wilfried B Sinaga, SH (SIB). Kemudian Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya, SH (Analisa), Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Drs. Eddy Syahputra Sorimin, M.Si (Koran Medan), Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Drs. H. Agus Syafaruddin Lubis (Realitas).

Sekretaris Edward Thahir, S.Sos (Waspada), Wakil Sekretaris I Drs. Rifki Warisan (Medan Pos), Wakil Sekretaris II Khairuddin (Mimbar Umum), Bendahara Zul Anwar Ali Marbun (Gebrak), dan Wakil Bendahara Hartati Rangkuti SPT (LPP RRI). Seksi Organisasi dan Hubungan Daerah: Ketua Sugiatmo, Sag, MAG (Analisa), Anggota Peirizal Purba (Waspada) dan Ahmad Rival Parinduri, Sag (Realitas). Seksi Pendidikan dan Latihan, Ketua Zulfi Azmi (Berita Sore), Anggota Dra. Yvona Siregar (LKBN Antara) dan Suasana Nikmat Ginting (Mimbar Umum).

Seksi Hukum dan HAM, Ketua Tuah Armadi (Medan Pos), Anggota Irianto, SH (Orbit) dan Nurkarm Nehe (Waspada). Seksi Pemerintahan, Politik dan Keamanan, Ketua Ir. Zulfikar Tanjung (Mimbar Umum), Anggota Gusliadi Ritonga (Andalas) dan Imam Fauzi (LKBN Antara).

Seksi Wartawan Olahraga (SiWO), Ketua Sahat Rahmat Hamonangan Panggabean, S.sos (Analisa), Wakil Ketua Johni Ramadhan Silalahi (Berita Sore), Sekretaris M. Samsir (Medan Pos). Seksi Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Julia Nuraini Tarigan (Mimbar Umum), Anggota Eli Marlina (Medan Pos). Seksi Pariwisata, Seni dan Budaya, Ketua H. Mohammad Nurdin (Medan Pos), Anggota Idris Pasaribu (Analisa). Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan, Ketua Benni Pasaribu, SE (Medan Bisnis), Anggota Risvande Lubis (Gebrak) dan Khairuddin Tanjung (Radio Sonya).

Seksi Media Elektronik, Ketua Drs. Hembry Ginting (LPP RRI), Anggota Hj. Tuty Daswisaptri SE (LPP TVRI) dan Henry Sianturi (MNC TV). Seksi IT/Fotographer, Ketua Said Harahap, S.Sos, MIKOM (Analisa), Anggota Dedy Mulia Purba (Sumut Pos). Seksi Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Muhammad Jul Ardi (Realitas), Anggota Chairul Anwar, S.sos (Medan Bisnis) dan Drs. Maju Manalu (Medan Pos).

Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut, Ketua H. Sofyan Harahap, S.sos (Waspada), Sekretaris H. War Djamil, SH (Analisa), Anggota H. Baharuddin (Andalas), Nurhalim Tanjung, MIKOM (Medan Bisnis) dan Azrin Marydha (Matahari). Sementara Penasihat terdiri dari, H. Soffyan (Analisa), H. Teruna Jasa Said (Waspada), H. M. Zaki Abdullah (Berita Sorea), H. Prabudi Said (Waspada), HA Ronny Simon (Gebrak), H. Farianda Putra Sinik, SE (Medan Pos), GM Immanuel Panggabean BBA (SIB), Drs. Muhammad Syahrir (Realitas) dan Drs. Simon Pramono (LKBN Antara).



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menghadiri Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Masa Bakti 2015-2020
Hotel Garuda Plaza Medan, Sabtu 30 Januari 2016





Februari



<http://diskominfo.sumutprov.go.id>

PEMROVSU DAN KOMITE II DPD RI BAHAS KRISIS ENERGI SUMUT

#Plt Gubsu : Listrik Sumut Butuh 1.000 MW

Medan, Meski kondisi kelistrikan Sumut saat ini surplus 111MW, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menilai Sumut masih membutuhkan penambahan pembangkit listrik baru minimal 1.000 MW. Karena menurutnya perkembangan investasi dan industri di Sumut bakal jalan di tempat apabila solusi krisis listrik dan gas tidak teratasi.

Hal itu diungkapkannya saat memimpin rapat pembahasan energy bersama Komite II DPD RI di Kantor Gubsu, Senin (21/1). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Komite II DPD RI Parliindungan Purba, beserta anggota yaitu Wa Ode Hamsinah Bolu (Sulawesi Tenggara), Kabib Ali (Banten), Matheus Stefi (Ambon), Dailami Firdaus (Jakarta), Nurbaeti Arlita (Kalbar), Rini Damayanti (Bengkulu), Rosti Uli Purba (Riau), Marhany Pua (Sulut), Rusli Rachman (Bangka Belitung), H. M. Mirza Wardana (Kaltim), Rafli Kande (Aceh), Novi Chandra (Sumbar) dan Asmawati (sumsel). Sementara itu hadir juga Plt Assisten Ekbang Ibnu Hutomo, Kepala Divisi Operasi PLN regional Sumatera Iwan Agung, General Manager PT PLN Sumut Agung Nugraha, para kepala SKPD Jajaran Pemprovsu, Pertamina, PGN, Kadin, APINDO, Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Sumut.

Dikatakan Plt Gubsu Sumut butuh tambahan minimal 1.000 MW lagi untuk satu dua tahun ke depan, karena pelanggannya masih waiting list saja mencapai 500 MVA, belum lagi memenuhi permintaan ke depannya. "Sumut adalah pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia wilayah Barat. Namun, tanpa ada energy, akan sulit bagi Sumut untuk berkembang. Karena itu kebutuhan listrik dan gas sangat penting," tegas Plt Gubsu.

Dia memaparkan beberapa kendala soal energy diantaranya masih minimnya pasokan listrik, harga gas untuk industri di Sumut yang termahal di Indonesia sehingga menyebabkan industri kalah bersaing dan panjang dan lamanya proses perizinan pembangkit listrik Mikro Hidro. Dijelaskannya harga gas di Singapur 6US\$ per mmbtu, sedangkan di Sumut di atas 10 US\$ per mmbtu, sekitar 13,5 US\$ per mmbtu sementara di Jawa hanya 8 US\$ per mmbtu. "Bagaimana industri bisa bersaing kalau biaya mahal, ini sangat memberatkan pelaku industry kita sehingga mereka sulit bersaing," ujar Plt Gubsu.

Dia juga memaparkan realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Sumut dengan potensi mencapai 1.000 MW yang mengalami stagnasi. "Sulitnya mendapatkan perizinan yang bisa memakan waktu 4-5 tahun dan kendala akses permodalan menjadi kendala utama para pengusaha," ujarnya.

Dalam Rapat tersebut, Ketua Komite Parliindungan Purba dan segenap anggota DPD RI benjanji akan mengusulkan hasil rapat ini dalam pembahasan di tingkat pusat. "Kami akan menggelar rapat tindak lanjut dengan pihak yang berwenang dan usulan ini akan menjadi bahan bagi kami," kata parliindungan Purba.

Dalam kesempatan itu GM PT PLN Sumut Agung Nugroho memaparkan saat ini jumlah total pelanggan di Sumut mencapai 3.171.291 pelanggan dengan daya mampu rata-rata 1.751 MW, Beban Puncak Rata-rata 1.721 MW dan cadangan rata-rata 111MW. Cadangan pasokan daya mampu rata-rata tahun 2015 terdiri dari pembangkit Sumbagut 1.362 MW, IPP 21 MW, Excess power 44 MW, sewa PLTD 254 MW dan ran permodalan rata-rata 70 MW.

PLN melakukan pembelian listrik dari IPP/EP kapasitas di bawah 10 MW pada tahun 2015 yang sudah beroperasi 11 unit (82MW), dimana sudah PPA 44 pengembang (378 MW), proporsal yang sudah masuk 142 pengembang (1.080 MW). Tambahan pembangkit di Sumbagut pada tahun 2015 sebanyak 380 MW terdiri atas PLTU P Susu (200 MW) dan PLTMG Arun 180 MW. Menurutny pada tahun 2016 akan ada tambahan pembangkit baru masuk ke sistem Sumbagut dengan total 460 MW. Diantaranya adalah dari PLTA Wampu 45 MW rencana COD (comercial operation date) Februari 2016, Marine Vessel #1 240 MW rencana COD April 2016, PLTP Sarulla 100 MW rencana COD November 2016, MPP Sumut 75 MW rencana COD 2016.

KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERİYAH, M.Si

Menghadiri Penerimaan Kunjungan Kerja Komite II DPD RI
Ruang Beringin Kantor Gubsu, Senin 1 Februari 2016



SEKDAPROVSU TERIMA KUNKER KOMISI X DPR RI

Medan, Sekdaprovsu H. Hasban Ritonga, SH mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kebijakan nasional sekaligus untuk menuntaskan layanan di semua jenjang, dengan komitmen yang tegas telah menetapkan kebijakan pemerintah provinsi melalui visi pembangunan tahun 2013-2018, menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara Sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Sekdaprovsu saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Kamis (04/02/2016) di Ruang Beringin Lt. 8 Kantor Gubsu. Rombongan yang hadir dipimpin Ir. HAR Sutan Adil Hendra, MM, hadir bersama dr. Sofyan Tan, Asdi Marang, SH, Ir. Bambang Sutrisno, Jamal Mirdad, Yayuk Basuki, H. Dedi Wahidi, Nur Hasan Zaidi, S.Sos, Hj. Laila Istiana.

Acara tersebut juga turut dihadiri Asisten Kesos Zulkarnain, Kepala Biro Binkemos, para pejabat Eselon III Dinas pendidikan Provsu, para rektor lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan negeri dan swasta di provinsi Sumatera Utara, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Kejuruan Regional Bagian Barat Sumatera, dan para instansi terkait dibidang pendidikan.

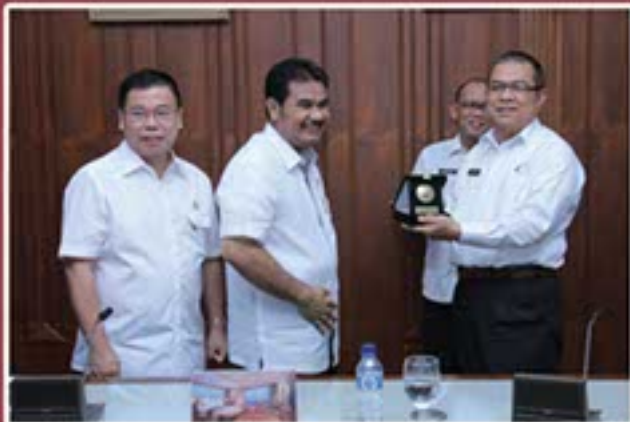
Dikatakan Sekdaprovsu sesuai dengan kunjungan Komisi X ke beberapa Sekolah yang ada di Kota Medan Sumatera Utara masih ditemukan kondisi sekolah tersebut yang masih membutuhkan pembenahan dan perbaikan, khususnya sarana dan prasarana pendidikan. Seperti Oleh karenanya Pemprovsu masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat. "Kita berharap dengan kunjungan ini, Komisi X DPR RI dapat mendorong pemerintah pusat untuk mengucurkan dana bantuan ke pemerintah provinsi Sumatera Utara lebih besar lagi, khususnya untuk infrastruktur di bidang pendidikan," ujar Sekdaprovsu.

Pada kesempatan itu Sekdaprovsu juga mengatakan bahwa dalam menyikapi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di bidang pendidikan, khususnya pengalihan kewenangan manajemen pendidikan menengahkan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi bahwa Pemprovsu menyatakan kesiapannya untuk melayani pengelolaan pendidikan menengah mulai tahun 2017 sesuai dengan amanah undang-undang dimaksud.

Hal tersebut bisa dilihat bahwa pemprovsu telah melakukan persiapan dan kegiatan yang antara lain menetapkan Tim Persiapan penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2014 di lingkungan Dinas Pendidikan Provsu, mengangkat panitia tim penyusunan ranperda penyelenggaraan bidang pendidikan, membentuk tim kelompok kerja (pokja) tentang kelompok kerja persiapan penerapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 di lingkungan dinas pendidikan Provsu, dan mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD bersama biro terkait untuk menyikapi UU Nomor 23 Tahun 2014. "Untuk menyongsong pelimpahan kewenangan, penataan SLTA/SMK Pemprovsu, sudah siap," sebut Sekdaprovsu.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ir HAR Sutan Adil Hendra, MM mengatakan bahwa salah satu Kunker Komisi X DPR RI I dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU 23 tahun 2014 di bidang pendidikan agar pendidikan pendidikan berkualitas dapat berjalan. Salah satu adalah pengawasan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 yang telah disempurnakan tahun 2015 oleh kementerian pendidikan Republik Indonesia dan kesiapan menyongsong pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di di daerah-daerah. Dan untuk kunjungan kali ini komisi X meninjau langsung ke beberapa sekolah yang ada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Setelah meninjau secara langsung di beberapa Sekolah ada di Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi X Sutan menyayangkan karena di sekolah yang dikunjungi disimpulkan belum siap dalam melaksanakan Ujian Nasional karena masih kurangnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut, seperti komputer. Oleh karenanya dia mengatakan bahwa dengan melihat kondisi ini, Komisi X DPR RI akan terus mendorong agar Sumatera Utara di bantu pemerintah pusat untuk meningkatkan pendidikan di Sumatera Utara. "Komisi X akan terus mendorong pemerintah pusat untuk membantu pemprovsu agar pendidikan di Sumatera Utara menjadi lebih baik ke depan," pungkasnya.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYHUB, SE
Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI
Ruang Beringin Kantor Gubsu, Kamis 4 Februari 2016





KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
 Melakukan Panen Raya Cabai Merah Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
 Kabupaten Batubara, Jumat 5 Februari 2016



KADIS KOMINFO PROVSU Drs, JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Menghadiri Acara Resepsi Pernikahan Anak Kadis Perhubungan Johanes Antonius Sinaga, SH dan Prity Siahaan
Hotel Santika Dyandra Medan, Sabtu 13 Februari 2016







KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU HJ. AFINI, SE
Menghadiri Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara
Kantor Bank Indonesia Medan, Senin 15 Februari 2016

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, Pada Senin, 15 Februari 2016 diadakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penandatanganan berita acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dari Ayub Amali, S.E., M.M., Ak.CA, selaku Plt. Kepala Perwakilan sebelumnya, kepada Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni M.M., Ak, selaku Kepala Perwakilan yang baru disaksikan oleh Anggota V BPK Bapak Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A. dan Tortama Keuangan Negara V BPK Bapak Dr. Bambang Pamungkas, MBA, Ak.

Turut hadir ada acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara, Ketua DPRD Kabupaten / Kota se- Sumatera Utara, Inspektur Kabupaten / Kota se- Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara yang dilaksanakan di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara tersebut berjalan dengan tertib dan khidmat.

Plt. Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dalam kata sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah H. Hasban Ritonga, Si menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan sebelumnya, yang telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu Anggota V BPK Bapak Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A. pada kata sambutannya menyampaikan bahwa promosi dan mutasi merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi dan sekaligus berharap agar dibawah kepemimpinan Kepala Perwakilan yang baru, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara senantiasa mengedepankan prinsip independensi, integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Sebelum menjabat menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni M.M., Ak. adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung. Beberapa jabatan yang pernah dijabat beliau antara lain Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung. Sementara itu Ayub Amali, S.E., M.M., Ak.CA, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mendapat jabatan baru sebagai Kepala Auditorat V. A.





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut
 Aula Kantor BPK Perwakilan Sumut, Senin 15 Februari 2016







KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
Melakukan Panen Bawang Merah Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) Pemprovsu
Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa 16 Februari 2016

PLT GUBSU : KDH SESUAIKAN VISI DAN MISI DAERAH DENGAN PRESIDEN # RIBUAN WARGA SAKSIKAN PELANTIKAN 15 KEPALA DAERAH

Medan, Ribuan warga masyarakat hadir menyaksikan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota se Sumatera Utara yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (17/2). Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri RI.

Plt Gubsu dalam amanahnya mengatakan Kepala Daerah yang sudah dilantik menjadi bupati/walikota harus menyesuaikan visi dan misi daerah dengan visi presiden dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu menekankan kembali pidato Presiden RI tanggal 12 Februari 2016 pada pelantikan 7 Gubernur hasil Pilkada serentak 9 Desember di Jakarta. "Presiden berpesan bahwa Pemilukada telah melahirkan pemimpin pilihan rakyat yang harus bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan rakyat di daerahnya," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Plt Gubsu, sudah saatnya para kepala daerah berjanji kepada rakyat untuk memastikan setiap rakyat merasakan makna kehadiran pelayanan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sarana dalam penyediaan fasilitas umum, ujar Plt Gubsu, maka kepala daerah harus memastikan semua rakyat dapat mengakses air bersih, listrik, menikmati layanan transportasi yang terjangkau serta bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Di bidang ekonomi, Presiden juga berpesan agar kita semua di daerah menjaga daya beli masyarakat dengan menekan dan mengendalikan inflasi. Program pemerintah dan pemerintah daerah harus berupaya membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah daerah harus merumuskan langkah-langkah yang lebih kongkrit untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kesenjangan sosial. "Oleh karena itu kita harus menyesuaikan visi dan misi daerah dengan visi presiden dalam melakukan pembangunan. Presiden menginginkan simpul pemerintah berada di provinsi, yang menghubungkan antara daerah dan pemerintah pusat," ujarnya.

Plt Gubsu juga mengingatkan agar para kepala daerah yang dilantik untuk tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan oleh rakyat melalui Pemilukada yang lalu. "Mulailah bekerja dengan baik, tidak perlu berlama-lama dalam euphoria kemenangan," katanya. Sebelumnya, Presiden telah meminta bahwa proses program dan kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan APBD harus dilaksanakan sejak bulan Januari 2016. Pelantikan dan pengambilan sumpah lima belas bupati/walikota terdiri atas 14 pasang bupati/walikota dan wakil adalah terpilih dari hasil Pilkada serentak pada 9 Desember lalu, sedangkan plt Bupati Tapteng dilantik sebagai bupati definitif.

Adapun 14 kepala daerah hasil Pilkada 9 Desember 2015 yang dilantik hari ini, yakni Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution (Medan), M. Syahril-Isma'il (Tanjungbalai), Muhammad Idaham-Timbas Tarigan (Binjai), M. Syarfi Hutauruk-Edipolo Sitanggang (Sibolga), Syahrul M Pasaribu-Aswin Efendi Siregar (Tapanuli Selatan), Kharuddin Syah Sitorus-Dwi Prantara (Labuhan Batu Utara), Soekirman-Darma Wijaya (Serdang Bedagai),

Taufan Gama Simatupang-Surya (Asahan), Pangonal Harahap-Andi Suhaimi Dalimunthe (Labuhanbatu), Wildan Aswan Tanjung-Kholil Jufri Harahap (Labuhan Batu Selatan), Remigo Yolando Berutu-Maju Ilyas Padang (Pakpak Bharat), Dosmar Banjarnahor-Saut Parlindungan Simamora (Humbang Hasundutan), Rapidin Simbolon-Juang Sinaga (Samosir), dan pasangan Darwin Siagian-Hulman Sitorus (Toba Samosir).

Pada saat yang sama, Plt Gubsu juga akan melantik Suran Jarman Tanjung sebagai Bupati Tapanuli Tengah definitif menggantikan Anwar Situmeang yang sudah diberhentikan secara tetap karena perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebanyak 14 kepala daerah hasil Pilkada serentak yang dilantik semua masa jabatannya sudah habis. Dengan demikian dari 23 kabupaten/kota se Sumut yang melaksanakan Pilkada langsung pada 9 Desember lalu, terdapat 9 daerah yang belum dilantik kepala daerahnya. Diantaranya 7 daerah belum habis masa kepelintahan bupati/walikota, Kabupaten Karo, Mandailing Natal dan seluruh daerah di Pulau Nias. Sedangkan dua daerah lainnya yaitu, Kota Sibolga dan Kabupaten Simalungun, baru menggelar pilkada pada 10 Februari lalu dan belum ditetapkan pemenang dalam pilkada susulan tersebut.

Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung khidmad bertempat pendopo Lapangan Merdeka Medan. Acara ini merupakan rangkaian Pemilukada serentak pada 9 Desember lalu. Sebagaimana Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Salah satu perubahan signifikan adalah tentang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden di Istana Negara, sedangkan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur di ibukota provinsi dengan tidak lagi melaksanakan rapat paripurna istimewa dewan perwakilan rakyat.

Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan, Plt Gubsu beserta kepala daerah yang baru dilantik berjalan menuju panggung rakyat yang berada di seberang pendopo. Sementara di sisi kanan dan kiri panggung rakyat terdapat tenda-tenda yang menyediakan produk khas daerah.

Panggung rakyat dimeriahkan artis ibu kota diantaranya Yuni Shara, Vicky Shu dan Hermy Kullit. Plt Gubsu beserta para kepala daerah yang baru saja dilantik ikut memeriahkan panggung rakyat dengan ikut bernyanyi bersama. Dia menghimbau agar seluruh masyarakat bersatu untuk membangun Sumut. "Kita semua harus kompak, jangan terkotak-kotak," ujarnya.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Walikota/ Wakil Walikota dan Bupati/ Wakil Bupati Prov. Sumatera Utara
Lapangan Merdeka Medan, Rabu 17 Februari 2016



KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU HJ. AFINI, SE

Menerima Kunjungan Kerja TPID Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Banten ke TPID Provinsi Sumatera Utara
Ruang Kuala Deli Gedung BI Medan, Kamis 18 Februari 2016









KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Drs. ELI SUHAERiyAH, M.Si
Rapat Evaluasi Kinerja Bidang Aplikasi Telematika Dinas Kominfo Provsu
Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Senin 22 Februari 2016





KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si
Menyerahkan Hasil Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumut Tahun 2015 kepada Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumut
Kantor BAPERASDA Provsu, Selasa 23 Februari 2016



KABID PUHK DISKOMINFO PROVSU Hj. ROSMIDAR, S.Ag, M.Pd
Melepas Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Diskominfo Provsu
Diskominfo Provsu, Jumat 26 Februari 2016







KADIS KOMINFO PROVSU Drs, JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menghadiri Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Provinsi Sumatera Utara
Ruang Rapat Kenanga Gubsu, Minggu 28 Februari 2016



**PLT GUBSU BUKA PRA MUSRENBANG RKPD 2017 ZONA PANTAI TIMUR
PRIORITASKAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

Medan, Pemprov Sumatera Utara menekankan 8 prioritas perhatian pembangunan untuk kawasan pantai timur Sumatera Utara dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017. Diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian, pengembangan perdesaan dan perkotaan serta wilayah kepulauan dan pulau terluar.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si saat membuka Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Zona I di Medan International Convention Center (MICC) , Senin (29/1) yang berlangsung selama 2 hari. Hadir dalam kesempatan itu Pelaksana Ketua DPRD Ruben Tarigan, para bupati/walikota 14 daerah di kawasan pantai Timur, pimpinan SKPD Provsu, dan para kepala Bappeda.

Adapun kedelapan prioritas pembangunan tahun 2017 adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, peningkatan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi/UMKM, perluasan kesempatan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan mendukung / mendorong kebijakan nasional di daerah.

Untuk peningkatan infrastruktur dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas jalan, pembangunan jalan tol dan kereta api, peningkatan angkutan sungai danau dan penyebrangan, operasi bandara dan pelabuhan dan pengembangan sistem angkutan masal. Selanjutnya memperbaiki irigasi, pengendalian banjir, pengelolaan DAS, sistem penyediaan air minum regional Mebidang dan pengembangan air minum wilayah perdesaan. Terkait permukiman, tahun 2017 akan dilaksanakan penanganan kawasan kumuh perkotaan, peningkatan kualitas hunian dan penyediaan rumah rakyat.

Selain itu, pada tahun 2017 diharapkan adanya perwujudan Smart Province, pembangunan kawasan olahraga terpadu, hilirisasi produk aluminium dan perkebunan di kawasan KEK Sei Mangkei yang berintegrasi dengan Kuala Tanjung. Disamping itu pengembangan kawasan Bandara Kuyala Namu dengan konsep aerotropolis dapat dimulai dan pengembangan kota baru di Kawasan Mebidangro dan KEK Sei Mangkei.

Diingatkan Plt Gubsu, bahwa berbagai prioritas perhatian pembangunan tersebut harus diintegrasikan dalam konteks kewilayahan melalui harmonisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang. Baik RTRW di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dalam sambutannya, secara khusus Plt Gubsu menekankan agar dalam pelaksanaan Pra Musrenbang, SKPD Provinsi dapat menyiapkan draft listing kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 per masing-masing sektor per zona wilayah pembangunan. Selain itu, Plt Gubsu meminta agar seluruh pihak pro aktif sehingga dapat menghasilkan program kegiatan yang berorientasi pada visi misi Sumut, nawacita dalam dimensi kewilayahan. "Dalam merumuskan kesepakatan program dan kegiatan agar lebih adil dan adil menghilangkan ego sektoral," imbuhnya.

Kepala Bappeda Sumut Akhyad Lubis menjelaskan bahwa pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provsu per zona baru pertama kali dilaksanakan mulai tahun ini merupakan bagian dari inovasi baru dalam perencanaan pembangunan di Sumut. Adapun daerah yang termasuk zona I (kawasan pantai Timur) adalah Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Siantar, Kabupaten Karo, Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan.

Selain itu zona pembangunan II kawasan Pantai Barat, Zona III kawasan dataran tinggi (pegunungan) dan Zona IV Kepulauan Nias. "Melalui pembahasan per zona wilayah pembangunan diharapkan perencanaan pembangunan Sumut tahun 2017 tidak saja merumuskan kebutuhan pembangunan di setiap zona namun lebih dari itu dapat mensinergikan program kegiatan SKPD," ujarnya.



KABID PUHK DISKOMINFO PROVSU HJ. ROSMIDAR, S.Ag, M.Pd
Menghadiri Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
Medan International Convention Centre, Senin 29 Februari 2016





Maret



<http://diskominfo.sjmutprov.go.id>



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Harian Sumut POS
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Jumat 4 Maret 2016





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Harian Sumut 24
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Jumat 4 Maret 2016



PLT GUBERNUR SUMUT BUKA PRA MUSREMBANG RKPD SUMUT ZONA II DI SIDIMPUAN

Padang Sidimpuan. Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap 7 kabupaten/kota di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabaksel) bersinergi dan saling dukung dalam merumuskan rencana pembangunan strategis. Harapan itu dikemukakan Plt Gubsu saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2017 Zona II, dengan tema Sinergitas Pembangunan dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Auditorium Kampus IAIN di Padangsidimpuan, Senin (7/3/2016).

Hadir dalam acara tersebut Walikota Padangsidimpuan Andar Amin, SSTP, M.Si, Bupati Mandailing Natal (Madina) Drs. Dahlan Hasan Nasution, SE, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsei) Syahrul Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamil Tanjung, Bupati Padang Lawas (Palas) Tongku Sutan Oloan, Wakil Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Riskon Pane, anggota DPRD Sumut H. Burhanuddin, mewakili Dandim 0212/TS Mayor Rabani, Waka Polres Padangsidimpuan Kompol Drs Tongku Pane, Sekda Pemko Padangsidimpuan Drs. H. Zulfendi, MM, sejumlah Muspida Pemkot Padangsidimpuan dan jajaran SKPD setempat.

Turut hadir jajaran SKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut diantaranya Kepala Bappeda Sumut, Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga, Kadis PSDA, Kadis Kelautan, Kadis Kehutanan, Kepala BPPT Sumut, Kepala Perpustakaan Sumut, Kepala BPBD Sumut, Kepala Bakorluh Sumut.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu menegaskan, Pra Musrembang tidak sekadar mengimpon aspirasi dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan di Sumut pada tahun 2017 mendatang, tetapi lebih luas yakni menjadi masukan terhadap RKPD Sumut dengan pendekatan teknokrat, partisipatif dan bottom up planning.

RKPD Sumut tahun 2017 memiliki kedudukan strategis dan merupakan RKPD keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut tahun 2013-2018. "Oleh karena itu, saya berharap agar kegiatan ini tepat sasaran dalam rangka mewujudkan visi misi Sumatera utara tahun 2013-2018 yakni menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara yang sejahtera," harap Plt Gubsu.

Plt Gubsu menilai, untuk mencapai sasaran pembangunan, dibutuhkan dukungan Pemrov, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Kota (Pemko), masyarakat pelaku usaha, pihak perguruan tinggi dan media lainnya untuk mendorong tingkat keberhasilan.

Hal yang tidak boleh terlupakan adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian. Salah satunya adalah menjadikan Kota Padangsidimpuan menjadi kota jasa. Pengembangan pedesaan menjadi perkotaan, peningkatan wilayah kepulauan melalui peningkatan kualitas jalan, perumahan rakyat, pemenuhan energy dan air bersih, pelayanan perizinan melalui Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) dan mewujudkan smart province.

Peningkatan daya saing produk pertanian juga perlu mendapat prioritas perhatian. Demikian juga dengan produk kelautan dan perikanan melalui hilirisasi industri pertanian, standarisasi produk unggulan daerah dan perkebunan yang memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna, inovasi dan kreativitas serta pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani.

"Zona II juga tidak boleh melupakan perhatian terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembersayaan koperasi, UMKM, industri rumah tangga, agribisnis dan pengembangan pasar tradisional, terminal agribisnis dan pasar induk serta pengembangan pasar modern berbasis kerakyatan dan produk local," jelas Plt Gubsu.

Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya pengusaha muda dan pemula. Begitu juga peningkatan taraf hidup masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mendorong kebijakan nasional di daerah.

Pemerintah pusat telah menyusun rencana tingkat nasional tahun 2017 menetapkan Money Follow Programe. Tujuannya agar tidak terjadi duplikasi pembangunan dan adanya institusi unit kerja penanggungjawab setiap sasaran 9 Program Nawacita dalam 3 Dimensi dan 4 Kondisi Perlu.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu juga berharap Pra Musrembang RKPD Sumut 2017 Zona II menelurkna inovasi baru melalui pembahasan perzona wilayah pembangunan. RKPD Sumut tahun 2017 Zona II tidak hanya merumuskan kebutuhan pembangunan, tetapi juga dapat bersinergi. "Saya minta, SKPD Provinsi agar mempersiapkan draft listing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 perzona wilayah pembangunan. Dalam pembahasan program kegiatan agar seluruh pihak pro aktif sehingga nantinya akan dihasilkan program kegiatan yang berorientasi pada visi misi Sumatera Utara dan Nawacita dalam dimensi kewilayahan," pesan Plt Gubsu.

Sebelum memukul gong sebagai tanda dibukanya Pra Musrembang RKPD Sumut 2017 Zona II di Auditorium IAIN Padangsidimpuan, Plt Gubsu tegas berpesan agar dalam merumuskan kesepakatan program dan kegiatan agar lebih arif dan adil serta menghilangkan ego sektoral untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah dengan orientasi memacu pertumbuhan ekonomi.

Sementara Walikota Padangsidimpuan, Andar Amin menyatakan rasa bangga karena Sidimpuan dipercaya menjadi tempat pelaksanaan Pra Musrembang RKPD Sumut tahun 2017 Zona II. "Ini merupakan kebanggaan bagi kami karena dipercaya menjadi tuan rumah dalam merumuskan rencana pembangunan di Sumut, khusus wilayah Zona II," ujar Andar. Andar juga menyatakan, akan mengusulkan rencana pembangunan Kota Padangsidimpuan yang bersinergi dengan Kabupaten/Kota di pesisir pantai barat Sumatera.



KABID POSTEL DISKOMINFO PROVSU GELORA VIVA SINULINGGA, SE, MM
Menghadiri Pembukaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
Padang Sidempuan, Senin 7 maret 2016





KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
 Menghadiri Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tingkat Provsu
 Gedung Kesenian Tuktuk Siadong Kab. Samosir, Selasa 8 Maret 2016



PLT GUBSU BERHARAP 1,5 JUTA LEBIH BALITA DI SUMUT BEBAS POLIO



Samosir, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap anak usia 0-59 bulan di Sumut bebas polio. Harapan itu disampaikan Tengku Erry Nuradi dalam pencahangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tingkat Sumut yang berlangsung di Kabupaten Samosir, Selasa (8/3/2016).

Hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK Sumut Iri Diani Erry, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Pj Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Kadis Kesehatan Sumut Sih Hatahi Suryantini, sejumlah anggota DPRD Sumut, SKPD provinsi dan kabupaten serta para ibu membawa balita masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu mengatakan, jumlah anak yang terdata mendapatkan imunisasi polio di Sumut tercatat 1.556.526 balita pada tahun 2016. "Sasaran dan target imunisasi tahun ini adalah seluruh balita yang merupakan kelompok paling rentan untuk tertular penyakit polio. Imunisasi tidak hanya terbatas pada anak yang sebelumnya sudah menerima imunisasi polio. Semoga bisa tercapai," harap Plt Gubsu.

Pencahangan PIN sendiri berlangsung sejak 8 hingga 14 Maret mendatang. Semua balita diberi tambahan imunisasi polio secara gratis baik di puskesmas maupun posyandu terdekat kebal terhadap penyakit polio. "Kita juga berharap melalui PIN yang secara serentak dilakukan di Indonesia ini, status bebas polio di Sumut dapat dipertahankan dan berkontribusi dalam mewujudkan dunia bebas polio tahun 2020," tandas Plt Gubsu.

Plt Gubsu menyatakan, Indonesia telah memperoleh sertifikasi bebas polio bersama negara-negara South East Asia Region (SEARO) Maret 2014 lalu. Negara yang saat ini endemis polio terpantau di Afghanistan dan Pakistan. "Butuh komitmen seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia untuk bersama-sama melakukan upaya pelaksanaan tahapan kegiatan menuju Dunia Bebas Polio 2020," tambah Plt Gubsu.

itu dapat terwujud merupakan prestasi besar kedua yang dicapai masyarakat dunia dalam bidang kesehatan setelah suksse membasmi (eradikasi) penyakit cacar (variola) tahun 1974 lalu. "Kita harus mempertahankan status eradikasi polio," sebut Plt Gubsu.

Sementara Bupati Rapidin Simbolon mengatakan, pelaksanaan PIN tidak hanya dilakukan di seluruh rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan posyandu saja, tetapi juga di sejumlah titik yang sengaja dibuat untuk memudahkan para ibu membawa anaknya mendapatkan imunisasi polio di Samosir.

"Kita memudahkan para ibu untuk membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi polio. Ini langkah untuk mendukung program nasional yaitu Indonesia bisa mempertahankan bebas polio," ujar Rapidin.



PLT GUBERNUR SUMUT: JAUHKAN EGO SEKTORAL BANGUN DANAU TOBA JADI MONACO OF ASIA

Samosir, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengajak seluruh pemegang kebijakan di sekitar kawasan Danau Toba untuk serius mendukung Danau Toba menjadi destinasi bertaraf internasional. Penegasan itu disampaikan Plt Gubsu saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2017 Zona III (daerah dataran tinggi Toba) di aula Hotel Toledo Inn, Samosir, Selasa (8/3/2016).

Hadir dalam acara tersebut 7 pemegang kebijakan di kawasan Danau Toba diantaranya Bupati Samosir Drs Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Samosir Ir Juang Sinaga, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan, Pj Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kepala Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat dan Kepala Bappeda Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) serta sejumlah SKPD Samosir. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri instansi terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut diantaranya Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Sumut, Kadis Perairan, Kadis Kehutanan, Kadis Perhubungan, Kadis PU, Bakorluh dan Kepala BPPT Sumut.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu menyatakan, sebanyak 7 kabupaten/kota yakni Pakpak Bharat, Dalri, Tput, Humbahas, Samosir, Tobasa dan Simalungun, memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan kesuksesan Danau Toba menjadi destinasi bertaraf internasional yang kini akrab disebut Monaco of Asia.

Sedikitnya 10 isu yang harus dicermati oleh kabupaten/kota di Zona III yakni, pertama; pelestarian ekosistem Danau Toba dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba. Kedua; hilirisasi industri CPO, kakao, karet dan kopi di kawasan dataran tinggi Toba. Ketiga; peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata.

Sedangkan isu strategis keempat; percepatan Rencana Aksi Daerah (RAD) pangan gizi, terutama meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan produksi beras dan komoditi pertanian mengingat letak Zona III yang sebagian besar merupakan dataran tinggi Bukit Barisan sebagai sentra pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang harus dikembangkan secara berkelanjutan. Kelima; komitmen pemerintah yang akan mengembangkan kepariwisataan berkela internasional di kawasan Danau Toba melalui peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan pelabuhannya.

"Peningkatan ketersediaan energi di kawasan dataran tinggi melalui pengembangan energi listrik dengan mengembangkan potensi minihydro power, energi panas bumi di kawasan dataran tinggi Danau Toba, juga menjadi isu strategis keenam yang tidak boleh dilupakan," sebut Plt Gubsu.

Sedangkan isu strategis ketujuh; peningkatan infrastruktur dasar terutama fasilitas jalan dan jembatan serta sarana pendukung produksi pertanian. Kedelapan; pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan disparitas senjangan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri rumah tangga, agribisnis dan pengembangan pasar tradisional serta terminal agribisnis dan pasar induk.

Plt Gubsu juga mengatakan, dari berbagai fokus pembangunan dan isu strategis, Pemprov Sumut menyusun 9 program prioritas tahun 2017 yang harus bersinergi yakni, pertama; peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Kedua; peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan terutama penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan melalui usaha preventif preemtif.

Ketiga; peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian, pengembangan kawasan peternakan dan perkotaan dengan pendekatan kewilayahan agropolitas dataran tinggi Bukit Barisan. Keempat; peningkatan daya saing produk pertanian, perikanan, peternakan melalui hilirisasi industri pertanian, perkebunan yang memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna, inovasi dan kreatifitas.

"Sedang program prioritas kelima adalah peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, industri rumah tangga, agribisnis dan pasar induk. Kemudian yang keenam adalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui dorongan penciptaan lapangan kerja dan pengusaha pemuda atau intreprenuer baru," sebut Plt Gubsu.

Ketujuh; peningkatan taraf hidup masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Kedelapan; peningkatan dukungan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Program Nasional (KSPN) yang bertaraf internasional. Sedangkan program prioritas yang kesembilan adalah mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah. "Dari berbagai prioritas itu, mari kita integrasikan secara holistic, tematik dalam konteks kewilayahan melalui harmonisasi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota di wilayah kawasan danau Toba dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup," pesan Plt Gubsu.

Sementara Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan, pihaknya akan menyatukan visi dan misi pembangunan dengan 6 daerah lain dalam membangun Danau Toba menjadi kawasan wisata bertaraf internasional. "Samosir siap mendukung program yang berwawasan wisata, lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Rapidin.

Pengelolaan industri kepariwisataan di kawasan Danau Toba, sebut Rasidin, belum maksimal sebagaimana layaknya. Akibatnya, Danau Toba hanya menjadi destinasi wisata alternative ditengah potensi yang luar biasa. "Satu daerah maju, daerah lain juga ikut maju. Karena pengembangan Danau Toba tidak dapat dilakukan oleh satu daerah saja. Harus komprehensif dan berkelanjutan," ucap Rasidin. Pembukaan Pra Musrebang RKPD Sumut Tahun 2017 Zona III ditandai dengan pemukulan gong oleh Plt Gubsu disaksikan Bupati dan perwakilan 7 kabupaten/kota yang di kawasan Danau Toba.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
 Menghadiri Pra Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provsu Zona III
 Hotel Toledo Samosir Convention Hall, Selasa 8 Maret 2016



KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si

Menerima Kunker Dishub Komunikasi dan Informatika Pemkab Nias Barat dalam rangka Konsultasi Pemutakhiran *Website* dan Jaringan Internet Ruang Kerja Kabid Aptel, Selasa 8 Maret 2016



DINAS KOMINFO PROVSU TERIMA KUNJUNGAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT



Medan, Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika (APTEL) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si didampingi oleh Pih. Kepala Seksi Pemberdayaan Telematika Abd. Qodir Zuhdy, ST dan Staf Seksi Pemberdayaan Telematika James Pauer Hujajulu, ST menerima kunjungan kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Solifati Gulo, S.Kom, MM, Kepala Sub Bagian Program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Verry Juliman Daeli, SH, dan Staf Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Sabaeli Gulo, S.IP. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka Konsultasi Pemutakhiran Website dan Jaringan Internet Kabupaten Nias Barat.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Menghadiri Pisah Sambut KAPOLDA Sumut dari Irjen Pol Drs. Ngadino, SH, MM kepada Irjen Pol Drs. Raden Budi Winarso
Regale International Convention Hall Medan, Senin 14 Maret 2016



PLT GUBERNUR SUMUT HARAPKAN KEPALA DAERAH KOMITMEN REALISASIKAN NIAS JADI DESTINASI WISATA DUNIA

Nias Utara. Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) tetap berkomitmen dan bersinergi membangun di Kepulauan Nias destinasi wisata bertaraf dunia. Hal itu dikemukakan Plt Gubsu saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut 2017 Zona IV Kepulauan Nias di Pendopo Bupati Nias Utara, Lotu, Kabupaten Nias Utara, Selasa (15/3/2016).

Hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK Sumut Evi Diana Erry, Bupati Nias Utara Edward Zega, Bupati Nias Sokhi'atulo Laoli, Bupati Nias Barat AA Gulodan, Walikota Gunungsitoli Martinus Lase, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut Difi Djohansyah, anggota DPRD Sumut asal Nias, sejumlah SKPD Sumut dan jajaran SKPD di Kepulauan Nias.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu mengatakan, Pra Musrenbang RKPD Sumut 2017 Zona IV Kepulauan Nias bertujuan menyinergikan rencana pembangunan di Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan. "Rencana pembangunan di Kepulauan Nias hendaknya bersinergi. Satu daerah dengan daerah lain saling dukung agar pembangunan yang dilakukan nanti tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi saya harapkan, mari kita singkirkan ego sektoral masing-masing daerah," pesan Plt Gubsu.

Hasil Pra Musrenbang Zona IV di Kepulauan Nias, nantinya akan menjadi rujukan dalam pembahasan pengembangan pembangunan pada Musrenbang RKPD Sumut tahun 2017 yang terjadwal akan berlangsung pada 1 April mendatang.

Plt Gubsu menyadari, tiap daerah di Kepulauan Nias memiliki skala prioritas pembangunan, namun skala prioritas tersebut diharapkan bersinergi dengan daerah lain di Kepulauan Nias. "Terutama usaha perhubungan jalan sebagai akses yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain. Demikian juga dengan perbaikan jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya," sebut Plt Gubsu.

Plt Gubsu juga mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus berupaya mengusulkan Kepulauan Nias menjadi kawasan Strategis Nasional. Pemerintah pusat menyetujui Keppres telah menetapkan Kawasan Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke di Simalungun, Kawasan Strategis Mebidangro (Medan-Binjai-Deliserdang-Karo) dan Kawasan Industri Kualatanjung.

"Nias adalah cikal-bakal Kawasan Strategis Nasional berikutnya. Pemerintah provinsi akan terus mendorong cita-cita agar Nias bisa ditingkatkan statusnya menjadi Kawasan Strategis Nasional," ujar Plt Gubsu.

Sebelumnya, Negara kepulauan Seychelles dan kepala daerah di Kepulauan Nias telah sepakat bekerjasama dalam pengembangan wisata. Hadir dalam Rapat Pembahasan Pengembangan Wisata Kepulauan Nias tersebut hadir Duta Besar (Dubes) Seychelles untuk ASEAN Mr Nico Barito.

Dalam pertemuan itu, Seychelles mau membantu dalam pengembangan Kepulauan Nias menjadi daerah wisata berkelas dunia. Komitmen ini harus terus kita jaga dengan baik. "Saat ini sudah ditetapkan dalam Keppres beberapa kawasan strategis yaitu Kawasan strategis Mebidangro (Medan-Binjai-Deliserdang-Karo), Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, Kawasan Industri Kualatanjung dan Kawasan Strategis Danau Toba. Nias adalah cikal bakal kawasan strategis, kita berharap Nias bisa ditingkatkan statusnya sebagai kawasan strategis nasional," ujar Plt Gubsu.

Untuk mengembangkan Nias sebagai destinasi wisata dunia, Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko sekepulauan Nias sepakat akan membentuk satu lembaga pengembangan Kepulauan Nias. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga payung hukum untuk pembentukan lembaga yang nantinya akan bekerja sama membangun pariwisata Nias.

"Saya optimis Kepulauan Nias akan menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Nias bisa menjadi Mutiara Sumatera Utara nantinya. Rumusnya harus komitmen dan kemauan keras, tidak hanya kepala daerah, namun juga masyarakatnya," ujar Plt Gubsu.

Seperti negara Kepulauan Seychelles, meski kecil, tetapi mampu menyedot perhatian wisatawan mancanegara. Nias tidak kalah indah dan dapat mencontoh keberhasilan Seychelles yang merupakan kepulauan agar berhasil menjadi salah satu destinasi dunia.

"Keberadaan Kepulauan Nias, tentu akan bersinergi dengan pengembangan Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Kita akan memiliki dua daerah wisata andalan nasional. Tentu akses transportasi antar kedua daerah harus mendukung," harap Plt Gubsu.

Pengembangan wisata di Kepulauan Nias, sebut Plt Gubsu, tidak hanya bicara keindahan alam, tetapi juga pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat lokal. "Tentu semua tidak akan berhasil jika masyarakat lokal menutup diri dengan kehadiran wisatawan. Rumus sukses daerah wisata salah satunya adalah pelayanan maksimal terhadap pengunjung, selain ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya," papar Plt Gubsu.

Selain wisata, Nias juga memiliki potensi lain seperti pengembangan bidang pertanian dan sumber daya energi. "Pemerintah provinsi juga mendorong Kepulauan Nias surplus listrik dengan adanya pengembangan pembangkit listrik. Saya juga berharap pemerintah daerah di Kepulauan Nias serius menjalankan program pengembangan desa agar tidak ada lagi kawasan yang terisolir di Kepulauan Nias," harap Plt Gubsu.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU M. AYUB, SE
 Menghadiri Pembukaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumut Tahun 2016 Zona IV
 Pendopo Nias Utara, Selasa 15 Maret 2016







KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
Menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara
Kantor Bank Indonesia Medan, Selasa 15 Maret 2016



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. MUHAMMAD AYUB, SE
Menjadi Pembina Upacara 17 an
Halam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Kamis 17 Maret 2016





KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
Operasi Pasar Bersama Bulog Drive Sumut dengan TPID Provinsi Sumatera Utara
Pasar Petisah Medan, Jumat 18 Maret 2016



PENGUKUHAN PENGURUS DAN MUKERDA MUI SUMUT DI PARAPAT, PLT GUBERNUR SUMUT DUKUNG PROGRAM GERAKAN HALAL NUSANTARA

Parapat, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mendukung penuh program Gerakan Halal Nusantara yang dicanangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Gerakan tersebut diharapkan dapat melindungi umat Islam dalam menggunakan produk maupun mengonsumsi makanan halal serta sehat.

Dukungan tersebut disampaikan Plt Gubsu dalam acara Silaturahmi, Pengukuhan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I MUI Sumut dan Muzakarah Tentang Kawasan Danau Toba di Open Stage, Parapat, Kabupaten Simalungun, Sabtu (19/3/2016).

Hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, DR. K. H. Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI Sumut, Prof. Abdullah Syah, seluruh ketua dan pengurus MUI kabupaten/kota seSumut, Ketua Panitia Ivan Iskandar Batubara, Bupati Simalungun, Binsar Situmorang, Bupati Pematang Siantar Jumsadi Damanik, Plt Dinas Sosial Asren Nasution, Kepala Bakorluh Sumut Bonar Sirait, Ketua PMI Sumut Rahmat Shah, jajaran SKPD dan FKPD Simalungun serta Danrem 022/PT Kolonel Toto Nurwanto, M.Si, Dandim 0207/Simalungun Letkol Oni Kristiyono Goendong, SH, Kapolres Simalungun AKBP Yofie Girianto Putro, anggota DPRD Pematangsiantar dan Simalungun.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubsu menyatakan, Gerakan Halal Nusantara merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam menjaga aqidah umat Islam terkait ketetapan halal dan haram suatu produk dan makanan. "Gerakan ini sangat penting bagi masyarakat, terutama umat Islam. Makanan misalnya. MUI akan mendorong UMKM maupun produsen untuk mendaftarkan label halal," sebut Plt Gubsu.

Dalam menjalankan Gerakan Halal Nusantara, MUI diharuskan melakukan tabulasi terlebih dahulu seluruh produk dan makanan yang beredar di Sumut. Selanjutnya, produk tersebut menjalani penelitian di laboratorium untuk memastikan kandungan, zat dan bahan yang ada dalam makanan.

"Tujuannya adalah untuk mendapatkan label halal. Dengan begitu, masyarakat tidak ragu dalam menggunakan produk seperti kosmetik dan lainnya. Begitu juga dengan olahan makanan," sebut Plt Gubsu.

Plt Gubsu yang juga Ketua Dewan Syariah Sumut, mengimbau masyarakat untuk mencoba menggunakan konsep syariah dalam menjalankan usaha. Konsep syariah, tidak hanya baik bagi umat Islam, namun juga bagi seluruh pemeluk agama. Konsepnya bagi hasil. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Konsep syariah juga berlaku dan baik untuk bidang usaha jasa," sebut Plt Gubsu.

Tidak lupa Plt Gubsu mengajak seluruh pemuka dan tokoh lintas agama untuk menyamakan rasa aman kepada masyarakat demi mendiptakan kerukunan antarumat beragama di Sumut. "Hal yang sangat penting adalah kerukunan umat beragama. Peran penting dan strategis pemuka agama adalah menyejukkan umatnya. Baik itu Islam, Kristen, Budha, Hindu dan juga Kong Hu Chu," sebut Plt Gubsu.

Plt Gubsu percaya, iman dan taqwa merupakan sumber energi dalam membangun Indonesia yang tangguh. Selain itu juga membutuhkan sinergitas dan soliditas antar seluruh Ulama serta komponen Islam lainnya guna mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang toleran, sejahtera ditengah penduduk yang majemuk. "Umat Islam harus terus menjalin hubungan harmonis dengan sesama pemeluk agama lainnya," tambah Plt Gubsu.

Senada, Ketua Umum MUI Pusat, DR. K. H. Ma'ruf Amin mengatakan, gerakan halal sudah mendunia. Tidak hanya di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, sejumlah negara lain kita sebangsa dan sehalal. "Halal itu sehat. Sehat bagi jasmani dan rohani. Tentu makanan tidak hanya perlu enak, tetapi juga harus sehat," sebut Ma'ruf.

Demikian juga dengan kerukunan antarumat beragama, merupakan modal dasar yang paling penting sebagai modal pembangunan bangsa Indonesia. Konflik antarumat beragama akan menghambat program-program pemerintahan. Tema yang dirugikan adalah masyarakat luas. "Umat Islam serta agama lainnya harus terus mengembangkan sikap yang toleran, membangun kasih sayang, tidak ego, serta bisa menjaga wilayah perbedaan masing-masing," jelas Ma'ruf.

Seluruh ulama, ujar Ma'ruf, harus menjaga akidah umatnya jangan menyimpang seperti terjadi pada organisasi Gafatar yang "mengoplos" ajaran agama dalam bentuk sinkritisme. "Umat Islam harus pula mengembangkan sikap moderat, ramah, santun, toleran, tidak ego, tidak fanatik, tidak saling membenci serta menjalin persaudaraan sesama umat maupun antarumat agar tidak terjadi konflik. MUI harus bisa memberikan penjelasan kepada umat manakala ada pertanyaan menyangkut berbagai hal yang kurang difahami dalam Al quran," papar Ma'ruf.

Dalam acara tersebut, juga berlangsung pengukuhan Pengurus MUI Sumut yakni Prof. DR. H. Abdullah Syah LcMA (Ketua Umum), DR. H. Ardiansyah LcMA (Sekretaris Umum), H. Abdullah Husein (Bendahara) serta para Dewan Penasehat dan Pengurus Komisi-Komisi.

Usai pengukuhan, acara kemudian dilanjutkan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat dan donor darah. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bibit pohon buah serta Al quran kepada Pengurus MUI Kabupaten di kawasan Danau Toba yakni MUI Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Dairi, Karo, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan MUI Pakpak Bharat.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu juga menyerahkan secara simbolik berbagai alat kebersihan kepada Camat Girsang Sipangan Bolon (Parapat) Arifin Nainggolan didampingi Danramil serta Kapolsek setempat. Dalam rangkaian kegiatan itu, dilanjutkan Rakerda I di Hotel Niagara yang diikuti sebanyak 250 orang peserta termasuk perwakilan MUI Kabupaten/Kota di Sumut yang berlangsung selama 2 hari sejak 19 hingga 20 Maret 2016.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Menghadiri Silaturahmi, Pengukuhan dan Rapat Kerja Daerah I MUI Sumut
 Open Stage Parapat Kab. Simalungun, Sabtu 19 Maret 2016



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menghadiri Jamuan Makan Malam Bersama Peserta Rapat Kerja Daerah I MUI Sumut
Hotel Niagara Parapat Kab. Simalungun, Sabtu 19 Maret 2016





Medan, Pengantugeraan S8 MUM24 Daahsyat AWARD untuk 27 penerima di tahun 2016. Inilah daftar penerimanya: Plt Gubernur Sumatera Utara, Ir. H. Tengku Erry Nurul, M.Si, Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin, M.Si, Wakil Wali Kota Medan, Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihandono, SH, M.Hum, Ir. Akhyar Nasution, Walikota Tanjungbalai M. Syahril Batubara, SH, M.Hum, Pj Walikota Pematangsiantar Drs. Sumayud Damanik, SH, M.Hum, Walikota Tebing Tinggi, Bupati Deliserdang, Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, CEO Aroma Bakery & Cake Shop, I. Suhardi, SE, Ketua IMI Musa Rajeck Shah, Ketua DPD Golkar Medan H. M. Syaf Lubis, Anggota DPDSU, Sutrisno, Ketua SPS Sumut, Anggota DPRDSU, H. Ajie Karim, Dirut PT Inalum Winardi, GM Grand Aston City Hall Silvey Tangkilisan, Pangkostrad Letjend TNI Edy Rahmawati, Tokoh Masyarakat H. Anif, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumut, Dir Pam Obvit Polda Sumut, Kombes Pol. DR. H. Hery Supiansauri, SH, MH, M.Si, Anggota DPRD Medan, Herry Zulkarnain, Dirut Bank Sumut dan Ketua SPS Sumut.

Ulang Tahun Sumut24 ke 4 membuktikan koran ini semakin dilirik para pembaca di seluruh Sumatera Utara. Buktinya, pada malam pengantugeraan kemarin malam, tamu-tamu terus datang dari berbagai kalangan. Acara dimulai dengan doa dan tari persembahan dan pementasan monolog Bunda Jibril "Matinya Sang Kritikus" dari Taman Budaya Medan dan ditutup dengan pengantugeraan award.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menerima Penghargaan Sumut 24 Dahsyat Award
City Hall Convention Hotel Grand Aston Medan, Minggu 20 Maret 2016

SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Memimpin Rapat Dewan Juri Lomba Foto Bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Provsu ke-68 Tahun
Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Selasa 22 Maret 2016



PEMROVSU GELAR LOMBA KARYA TULIS PERS DAN FOTO PERS TAHUN 2016

Medan, Dalam rangka Hari Jadi ke 68 Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mengadakan Lomba Karya Tulis Pers dan Foto Pers Tahun 2016. Sekretaris Dinas Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE menjelaskan dalam rapat dengan Dewan Juri, Jumat (22/3) di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu bahwa thema Karya Tulis yaitu "Danau Toba Go Internasional Menuju SUMUT Paten". Sedangkan thema Lomba Foto Pers yaitu "Danau Toba Go Internasional Menuju SUMUT Paten" (Landscape, Human Interest, Culture, Arsitektur).

Adapun syarat-syarat perlombaan karya tulis pers :

1. Karya tulis yang dikutsertakan dalam lomba adalah, naskah yang ditulis sendiri oleh peserta bukan merupakan plagiat atau karya orang lain.
2. Naskah Tulisan yang diperlombakan, harus sesuai dengan Tema dan dimuat dalam media dimana peserta lomba bertugas dengan dilampirkan kartu Pers dan KTP.
3. Naskah Tulisan yang diperlombakan tidak dibenarkan dimuat dalam media yang bukan tempat peserta lomba bertugas.
4. Batas waktu dimuatnya Naskah tulisan yang diperlombakan adalah sampai dengan Hari Senin, 11 April 2016.
5. Khusus untuk Media On Line, minimal 5000 karakter dan menyertakan link website dimana tulisan dimuat sebagai bahan verifikasi.
6. Seorang peserta lomba, hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) Naskah Tulisan untuk diperlombakan.

Isi Naskah yang diperlombakan berbentuk Reportase atau Laporan yang bermateri:

1. Memenuhi bahasa jurnalistik dan tetap berpedoman dengan EYD,
2. Fakta atau data yang dapat dipertanggung jawabkan,
3. Analisis,

Saran dan Kesimpulan.

1. Peserta Lomba Karya Tulis, bebas menentukan Judul Tulisan, tetapi harus mencerminkan inti tulisan tentang thema lomba yaitu : " Danau Toba Go Internasional Menuju SUMUT Paten".
2. Naskah tulisan yang diperlombakan ditulis dalam ukuran A4 minimal 5000 karakter, 1,5 spasi, huruf tulisan Times New Roman, 12 font dan Disimpan kedalam CD (diserahkan bersama dengan tulisan/kliping koran), dengan spesifikasi penyimpanan Microsoft Word.

Sedangkan syarat-syarat perlombaan foto pers :

1. Peserta adalah jurnalis/pewartawaktu foto yang berdomisili di Sumatera Utara, bekerja pada Media Cetak, Portal Berita dan Kantor Berita dengan menyertakan foto copy ID Press dan KTP.
2. Foto yang dikutsertakan merupakan karya sendiri, bukan merupakan plagiat atau karya orang lain.
3. Foto yang dikutsertakan adalah foto yang belum pernah dikutsertakan pada perlombaan-perlombaan manapun.
4. Foto yang diperlombakan adalah foto hasil karya yang diambil pada 1 Januari 2016 s.d 11 April 2016 dan lokasi pengambilan foto berada di kawasan Danau Toba, dan dicetak diatas kertas foto berwarna ukuran 8R (20 cm x 30 cm).
5. Foto yang masuk kepada panitia tidak dikembalikan dan menjadi hak panitia untuk kepentingan publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun.
6. Judul Foto, teks foto, lokasi pemotretan, waktu pemotretan, nama peserta, alamat peserta, nomor telepon, peserta, ditulis pada kertas selebar dan tidak ditempel dibelakang foto (dikertas terpisah).
7. Peserta lomba wajib mengirimkan minimal 3 (tiga) karya foto untuk diperlombakan (harus sesuai dengan thema).
8. Peserta wajib menyerahkan file asli foto dalam bentuk CD /CVD.
9. Edit pada foto yang diizinkan hanya sebatas edit minor (sharpening, dodging, burning) tanpa mengurangi atau menambahkan material foto dan tidak memasukkan unsur non fotografis didalam foto.
10. Foto dikirimkan kepada panitia dalam amplop tertutup dan diterima panitia paling lambat Senin 11 April 2016 ,pukul 16.00 WIB di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Jalan H. M. Said No. 27 Medan.

BULOG – TPID SUMUT BORONG BAWANG PETANI

Karo, Kepala Perum BULOG Divre Sumatera Utara Drs. Fatah Yasin Bersama TPID Sumut dan KTNA meninjau Panen Bawang Merah di Desa Batu Karang Kecamatan Payung Kabupaten Karo petani Binaan dari Bank Indonesia pada tanggal 23 Maret 2016.

Mengingat belakangan ini tingginya harga bawang ditingkat konsumen dan termasuk penyumbang inflasi, Sesuai Hasil Rapat TPID Pemprov Sumut dalam rangka menstabilkan kembali harga bawang ditingkat konsumen maka Perum BULOG Divre Sumut bersama tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprov Sumut dan KTNA langsung terjun kelapangan dan mengadakan pembelian (memutus mata rantai distribusi) ke lokasi pertanian.

Menurut petani bawang tersebut selama ini ketika waktu masa panen tiba mereka hanya dapat menjual hasil panennya bekisar Rp. 16.000,-/kg dimana biaya produksi mulai tanam sampai dengan panen bekisar Rp. 10.000,-/kg (masa tanam sampai panen 65 hari) sehingga Petani mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,-/kg

Hasil panen tanam bawang merah perhektarnya bisa mencapai 12 ton, jadi bila dihitung keuntungan per hektarnya = Rp. 6.000,- x 12.000 kg = Rp 72.000.000,-/ sudah dipotong biaya produksi (tingkat kesejahteraan petani dapat dikatakan memuaskan). Sementara pada saat ini Harga bawang dijual ditingkat Petani Rp. 27.000,-/kg dengan biaya produksi tidak jauh beda dengan sebelumnya atau tingkat kesejahteraan Nilai Jual Hasil Panen Petani lebih memuaskan lagi.

Kepala Perum BULOG Divre Sumut langsung membeli bawang tersebut sebanyak 500 kg untuk dipasarkan kembali dalam rangka stabilisasi harga ditingkat konsumen sembari menunggu hasil panen berikutnya untuk dibeli kembali.

Setelah meninjau petani bawang, dilokasi desa yang sama Tim berkesempatan meninjau kilang padi mini dan petani jagung. Perkembangan harga Gabah Kering Giling (GKG) Rp. 6.000,-/kg dan langsung dibeli seluruhnya yang ada di kilang tersebut (dua ton lebih) pembelian Perum BULOG via Komersil karna kalau harga pembelian dengan PSO tinggi.

Sedangkan harga jagung ditingkat pengepul dengan kadar air 17 % dijual seharga Rp. 3.750,-/kg dan saat ini stok dilokasi tersebut kosong karena belum panen. Dan Tim melanjutkan lagi kelokasi petani cabai merah di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, dimana harga cabai merah Rp. 32.000,-/kg sampai dipusat pasar medan.

Dengan demikian hasil pantauan dari Perum BULOG Divre Sumut beserta tim bahwa saat ini harga ditingkat petani cukup baik tinggal saja Tim akan memantau terus perkembangan harga ditingkat konsumen dimana jika terjadi gejolak harga ditingkat konsumen maka Tim akan turun untuk menstabilkan harga dengan melakukan operasi pasar.

Sementara Perum BULOG Divre Sumut bersama TPID Pemprov Sumut mengadakan operasi pasar cabai dan bawang merah di pasar-pasar Medan, hasil pantauan saat ini harga cabai merah sudah mulai normal yang mana sempat tembus berkisar harga Rp. 53.000,- s/d Rp. 60.000,-/kg begitu juga dengan harga bawang merah yang mana sebelum operasi pasar harga sempat menyentuh Rp. 42.000, s/d Rp. 45.000,-/kg dan saat harga bawang merah sekitar Rp. 36.000,-/kg.



KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE
Melakukan Panen Bawang Merah Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprov
Desa Batu Karang Kab. Karo, Rabu 23 Maret 2016



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Menghadiri Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Sumatera Utara
 Aula Martabe Kantor Gubsu, Kamis 24 Maret 2016

YASONNA SERAHKAN PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA KEPADA PLT GUBSU

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Tahun 2016 atas jasanya membina, mengembangkan dan menumbuhkan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Sumatera Utara. Penghargaan itu diberikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H Laoly di ruang Martabe, Kantor Gubsu Medan, Kamis (24/3). Dalam kesempatan tersebut Menteri juga menyerahkan Anubhawa Sasana kepada 72 kepala desa/lurah, 48 camat serta 10 bupati dan walikota se Sumatera Utara.

Penyerahan Anubhawa Sasana dilaksanakan pada acara Peresmian Desa/kelurahan Sadar Hukum dan Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/ Anubhawa Sasana Kelurahan serta penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut dan Pemprovsu serta Pemkab/Pemko tentang Pelayanan Hukum dan HAM. Pada kesempatan yang sama Kemenhukum dan HAM juga menandatangani MoU dengan DPRD Sumut tentang Legislasi Daerah serta dengan Kodam I/BB tentang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, Ketua DPRD Sumut Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Raden Budi Winarso, Kajati Sumut M. Yusni, Kasdam I/ BB Brigjen TNI Widagdo Hendro, Dan Bentanmak Kol Marinir Widodo Dwi Purwanto, Pangkosek Hanudnas III Marsma TNI Jemi Trisonjaya, para bupati dan walikota, para camat dan kepala desa serta Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengungkapkan harapannya agar ke depannya semakin banyak desa dan kelurahan sadar hukum di Sumatera Utara. Menurutnya tidak mudah bagi desa atau kelurahan ditetapkan sebagai Desa / Kelurahan Sadar Hukum. Prosesnya diawali dengan penetapan desa/kelurahan yang mempunyai kelompok kadarkum (keluarga sadar hukum:red) yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemampuannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum dirinya.

Setiap kelompok kadarkum minimal terdiri atas 25 orang, yang terus dinaungi oleh Pembina dari pusat maupun daerah. "Desa sadar hukum yang sudah dibina dan atas prakarsa sendiri dapat ditetapkan sebagai desa sadar hukum dengan kriteria antara lain tingkat pelunasan kewajiban PBB diatas 90%, tidak terdapat perkawinan anak dibawah umur, angka kriminalitas rendah dan penyalahgunaan narkoba rendah," jelas Yasonna. Dalam kesempatan itu Yasonna juga menyampaikan pihaknya terus menggalakkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Lapas. "Di lapas terus akan dilakukan sikak untuk bersihkan lapas dari peredaran narkoba, saat ini di Lapas Tanjung Gusta saja 70% penghuninya adalah bandar dan pengguna narkoba" katanya.

Penyalahgunaan narkoba menurut Yasonna menjadi ancaman besar bangsa, karenanya dia mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat memeranginya. "Narkoba sudah masuk daerah terpencil, dengan segala cara mereka memberi narkoba kepada anak-anak SD dan SMP," katanya. Menurut Yasonna di Indonesia ada 5 juta pengguna narkoba, sehingga membuat Bandar internasional melihat negara kita menjadi pangsa besar narkoba. Ini berbahaya bagi generasi ke depan. Saya minta agar membina untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk mencegah penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat hingga keluarga," ujar Yasonna.

Sementara itu, Plt Gubsu mengungkapkan terimakasih kepada aparat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota yang sudah melakukan pembinaan dan menumbuhkan kesadaran hukum di wilayah masing-masing. Dia menghimbau agar desa dan kelurahan yang belum berkesempatan menerima Penghargaan Anubhawa Sasana dapat lebih terpacu untuk membina desa dan kelurahan Sadar Hukum. "Mari kita tingkatkan kesadaran hukum di wilayah masing-masing, karena dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum di tengah masyarakat, maka provinsi yang kita cintai ini akan semakin kondusif dan masyarakat akan semakin sejahtera," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri menandatangani 10 prasasti sebagai desa sadar hukum di Sumut yaitu Desa Sisobawino II, Kecamatan Loloftu Moi, Nias Barat, Desa Fadoro Lauru, Kecamatan Hiliduho, Nias, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Tanjungbalai, Desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas, Labuhan Batu Utara, Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Batubara, Desa Pargarutan Tonga Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Desa Parmanuhan, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara, Desa Silima Kuta Kecamatan Tinada, Pakpak Bharat, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Desa Makmur, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai.

PLT GUBSU GALAKKAN WIRID DI JAJARAN PEMPROV SUMUT

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mulai menggalakkan kegiatan wirid atau pengajian setiap Kamis malam di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pembuka, Plt Gubsu menggelar pengajian di rumah Dinas Gubsu di Jalan Sudirman Medan, Kamis (24/3) malam.

Hadir pada acara tersebut Ketua MUI Sumut Prof. Dr. H. Abdullah Syah, Kanwil Kemenang Drs. H. Tohar Bayo Angin, Ketua MUI Kota Medan Prof. Muh Hatta dan sejumlah pimpinan SKPD di Lingkungan Provinsi, Alim Ulama dan tokoh agama. Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu mengintruksikan untuk menggelar pengajian setiap Kamis malam yang dimulai dari kediaman Rumah Dinas dan selanjutnya Sekda Provsu lalu ke kediaman kepala SKPD yang beragama Islam.

Plt Gubsu mengatakan pengajian Kamis malam ini telah digagas oleh mantan Gubernur Sumut Almarhum Rizal Nurdin. "Kegiatan pengajian ini sebenarnya telah dilakukan oleh Gubsu Alm Rizal Nurdin. Karena selain bisa meningkatkan jiwa spritual juga ketaqwaan kepada Allah SWT," paparnya.

Menurutnya perbaikan moralitas, mental adalah kunci dalam keberhasilan pembangunan. Khususnya di lingkungan birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, "Integritas dan disiplin pegawai adalah upaya yang perlu terus menerus ditingkatkan yang salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan. Dengan moral dan mental aparatur yang terbina secara baik maka program pembangunan dapat dijalankan lebih baik lagi," katanya.

Himbauan untuk menggelar pengajian setiap Kamis malam juga disampaikan Plt Gubsu kepada Pemerintah Kabupaten/kota. "Saya berharap kegiatan wirid atau pengajian setiap malam Kamis kembali digalakan sehingga menjauhkan Sumut dari bencana," katanya.

Sementara Prof. Dr. H. Syahrin Harahap mengatakan pada masa ke zaman kejayaan Islam kegiatan pengajian selalu dilakukan, dengan diselenggarakannya kegiatan ini sangat baik untuk menambah jiwa spritual dan kelimanan umat. Mengingat Sumut saat ini mengalami kemerosotan martabat sehingga berdampak kinerja pembangunan.

"Untuk itu sangat baik bila dilakukan pengajian atau wirid kampung yang diadakan setiap Kamis malam, karena selain membaca surat yasin, tahlilan juga menemani dan pada orang tua yang sudah meninggal," paparnya.

Tak hanya itu dalam tausiahnya juga disampaikan umumnya para ulama dalam pengajian selalu orientasi memperbaiki orang lain, tetapi Islam utk menyelamatkan diri sendiri baru orang lain. Sebagaimana Al quran menyebutkan bahwa Allah akan merubah suatu kaum bila kaum itu mau merubahnya.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Menghadiri Pengajian Pemprovsu Membangun Pribadi "PATEN"
 Rumah Dinas Gubernur, Kamis 24 Maret 2016

DISKOMINFO PROVSU SOSIALISASI SPT DENGAN PROGRAM E-FILING



Medan, Kepala Bidang Postel Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Gelora viva Sinulingga, SE, MM membuka sosialisasi program e - filing penyampaian pajak (SPT) bekerjasama dengan kantor pelayanan pajak medan timur Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2016. Hadir dalam kesempatan Tersebut, pejabat struktural dan fungsional serta staf di lingkungan Dinas Kominfo Provsu.



KABID POSTEL DISKOMINFO PROVSU GELORA VIVA SINULINGGA, SE, MM
Membuka Sosialisasi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara *Online* menggunakan Program *e-Filing*
Aula Transparansi Diskominfo, Kamis 24 maret 2016

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Menghadiri Temu Konsultasi BAKOHUMAS dalam rangka Pemilihan Pengurus
 BAKOHUMAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 - 2018
 Hotel Inna Dharma Deli Medan, Kamis 31 Maret 2016







EDISI JANUARI - MARET 2016

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

<http://diskominfo.sumutprov.go.id>